



**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA LAMUK
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

Skripsi

**Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I
Untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

Imam Wahyudi Raharjo

3353404005

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ety Soesilowati, M.Si
NIP. 196304181989012001

Drs. ST. Sunarto MS
NIP. 194712061975011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

PERPUSTAKAAN
UNNES

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si
NIP.196702071992031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Dra. J. Titik Haryati, M.Si
NIP. 195206221976122001

Anggota I

Anggota II

Dr. Etty Soesilowati, M.Si
NIP. 196304181989012001

Drs. ST. Sunarto MS
NIP. 194712061975011001

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui :

Dekan,

Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP.196208121987021001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi atau tugas akhir ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap (Al-Insyirah:6-8).
- Orang paling bahagia di duna ini adalah mereka yang pandai bersyukur, bersyukurlah dengan selalu berfikir positif tentang Allah SWT, dirimu dan masa depanmu.
- Jika anda optimis hasilnya akan optimal, jika anda pesimis hasilnya akan minimal.
- Usaha itu ikhtiar, doa itu tawakal dan hasil itu kuasa Allah SWT.

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang telah membuatku ada.
2. Bapak ibu dosen yang telah mendedikasikan waktunya demi sebuah kemajuan
3. Sahabatku dan teman-teman Ekonomi Pembangunan 2004
4. Sakti Dian Kumalasari yang selalu memotivasi
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata I (satu) guna meraih gelar sarjana Ekonomi. Berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroadmodjo, M. Si, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
4. Dr. Ety Susilowati, M.Si, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. ST Sunarto, M.S, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dra. J. Titik Haryati, M.Si, Selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran untuk melengkapi skripsi.

7. Dosen dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah mendukung dan memperlancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bp. Bachrun, Kepala Desa Lamuk yang telah memberikan ijin dan membantu dalam penelitian ini.
9. Bp. Torik H, Sekretaris Desa Lamuk beserta Semua Perangkat Desa Lamuk yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Warga Desa Lamuk yang telah membantu dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang saya berikan kepada beliau selain doa semoga Allah SWT Membalas semua Amal dan jasanya. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan saran dari pembaca sangat penulisa harapkan.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

ABSTRAK

IMAM WAHYUDI RAHARJO. 2009. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga*. Prodi : Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing (1) Dr. Etty Susilowati, M.Si, (2) Drs. ST Sunarto, M.S.

Kata kunci : Kondisi Rumah Tangga Miskin, Implementasi PNPM. Hasil, Kendala dan Penanganan kendala

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang memiliki orang miskin yang cukup banyak yaitu 707 KK dari 5.695 KK se Kecamatan Kejobong. Masalah kondisi irigasi yang rusak juga sangat mengganggu kegiatan para petani, kekurangan air bersih juga dialami banyak warga. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi rumah tangga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, bagaimana implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, bagaimana Hasil PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta usaha penanganan kendala. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kondisi rumah tangga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui dan menganalisis implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui dan menganalisis Hasil PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta usaha penanganan kendala.

Populasi penelitian ini berjumlah 707 KK miskin, sampel sebanyak 88 KK miskin dengan teknik metode *Proporsional area random sampling*, variabel penelitian ini adalah kondisi rumah tangga miskin, implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk, Hasil, Kendala dan usaha penanganan kendala pelaksanaan PNPM Mandiri. Metode pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, wawancara dan kuisioner (angket). Metode analisis data adalah deskriptif presentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk rumah tangga miskin telah tamat SMP dengan persentase 50,00%, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari plester 48,86 %, jenis dinding terbuat dari papan 30,68 %, memiliki sarana buang air besar milik pribadi sebanyak 65,91 %, jenis bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar 70,45% , mengkonsumsi daging dalam satu minggu kategori tidak pernah atau satu kali dalam satu minggu 87,50%, mengkonsumsi ayam dalam satu minggu ketegori tidak pernah 70,45 %, kategori tidak pernah atau satu kali mengkonsumsi susu dalam satu minggu 76,14%, membeli pakaian dalam satu tahun sebanyak satu kali 95,45%, makan tiga kali sehari sebanyak 60,23 %, akses kesehatan menggunakan Puskesmas 53,41%, jumlah pendapatan kepala keluarga miskin antara kurang dari 600 ribu sebanyak 64 orang (72,72%), tidak mempunyai tabungan sebanyak 65 orang (73,86%). Implementasi PNPM berjalan dengan lancar dengan program perbaikan irigasi dan sarana air bersih, hasil yang dicapai ketepatan sasaran 79,26 % , ketepatan tujuan 88,64 % ketepatan manfaat 76,42 %, kendala yang dihadapi adalah

rumitnya administrasi serta rendahnya swadaya masyarakat terkait kebutuhan tenaga swadaya.

Saran yang dapat diajukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan proporsi dana PNPM sehingga implementasi PNPM dapat berjalan lebih optimal, serta menyertakan dana pelestarian program.



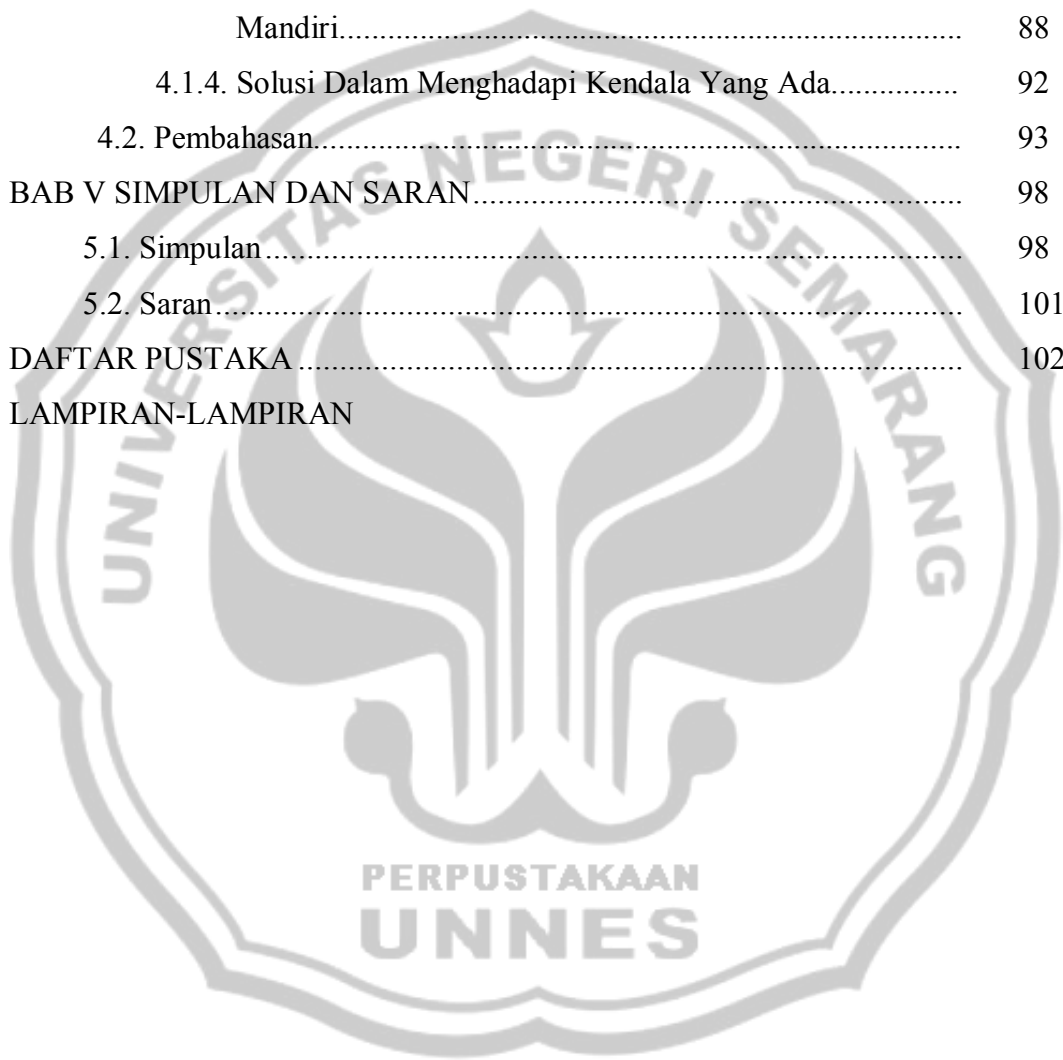
DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Kemiskinan	8
2.1.1. Konsep Kemiskinan.....	8
2.1.2. Ukuran Kemiskinan.....	12
2.1.3. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	20
2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.2.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	21
2.2.2. Langkah Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.2.3. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.3. Konsep Kesejahteraan	25
2.3.1. Indikator Kesejahteraan.....	26

2.3.1.1 Dimensi Moneter.....	27
2.3.1.2 Dimensi Non Moneter	28
2.4. Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.....	29
2.4.1. Pengertian Efektivitas.....	29
2.4.2. Alat Untuk Mengukur Efektivitas Program.....	30
2.5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan	31
2.5.1. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.....	31
2.5.2. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan	32
2.5.3. Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri.....	35
2.5.4. Tahapan Pelaksanaan Program	39
2.5.5. Besarannya Alokasi Bantuan Langsung Mandiri.....	41
2.5.6. Tahapan Penyaluran Dana	44
2.6. Penelitian Terdahulu.....	45
2.7. Kerangka Berfikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Populasi.....	49
3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	49
3.3. Variabel Penelitian.....	51
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	53
3.4.1 Metode Kuesioner (angket).....	53
3.4.2 Metode Dokumentasi	54
3.4.3 Metode Wawancara	54
3.5. Validitas dan Reliabilitas.....	54
3.5.1 Validitas/kesahihan.....	54
3.5.2 Reliabilitas.....	56
3.6. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Hasil Penelitian	60

4.1.1. Deskripsi Wilayah dan Responden Penelitian	60
4.1.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	60
4.1.1.2. Kondisi Rumah Tangga Miskin.....	61
4.1.1.2.1 Tingkat Pendidikan.....	61
4.1.1.2.2 Jenis Lantai.....	62
4.1.1.2.3 Jenis Dinding.....	63
4.1.1.2.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	64
4.1.1.2.5 Jenis Bahan Bakar.....	65
4.1.1.2.6 Konsumsi Daging.....	66
4.1.1.2.7 Konsumsi Ayam.....	67
4.1.1.2.8 Konsumsi Susu.....	68
4.1.1.2.9 Frekuensi Pembelian Pakaian.....	69
4.1.1.2.10 Frekuensi Makan.....	70
4.1.1.2.11 Akses Kesehatan.....	71
4.1.1.2.12 Jumlah Penghasilan.....	72
4.1.1.2.13 Jumlah Tabungan.....	73
4.1.2. Implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	74
4.1.2.1. Pelaksanaan Kegiatan	74
4.1.2.1.1 Deskripsi Program.....	74
4.1.2.1.2 Dana Yang dikucurkan.....	74
4.1.2.1.1 Sasaran program yang telah tercapai.....	75
4.1.2.2. Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan.....	76
4.1.2.3. Sasaran Program PNPM Mandiri Perdesaan.....	77
4.1.2.4. Tahapan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan.....	77
4.1.2.5. Jumlah dana yang dialokasikan.....	78
4.1.2.6 Tahapan Penyaluran Dana	79
4.1.2.7 Realisasi Penyaluran Dana.....	79

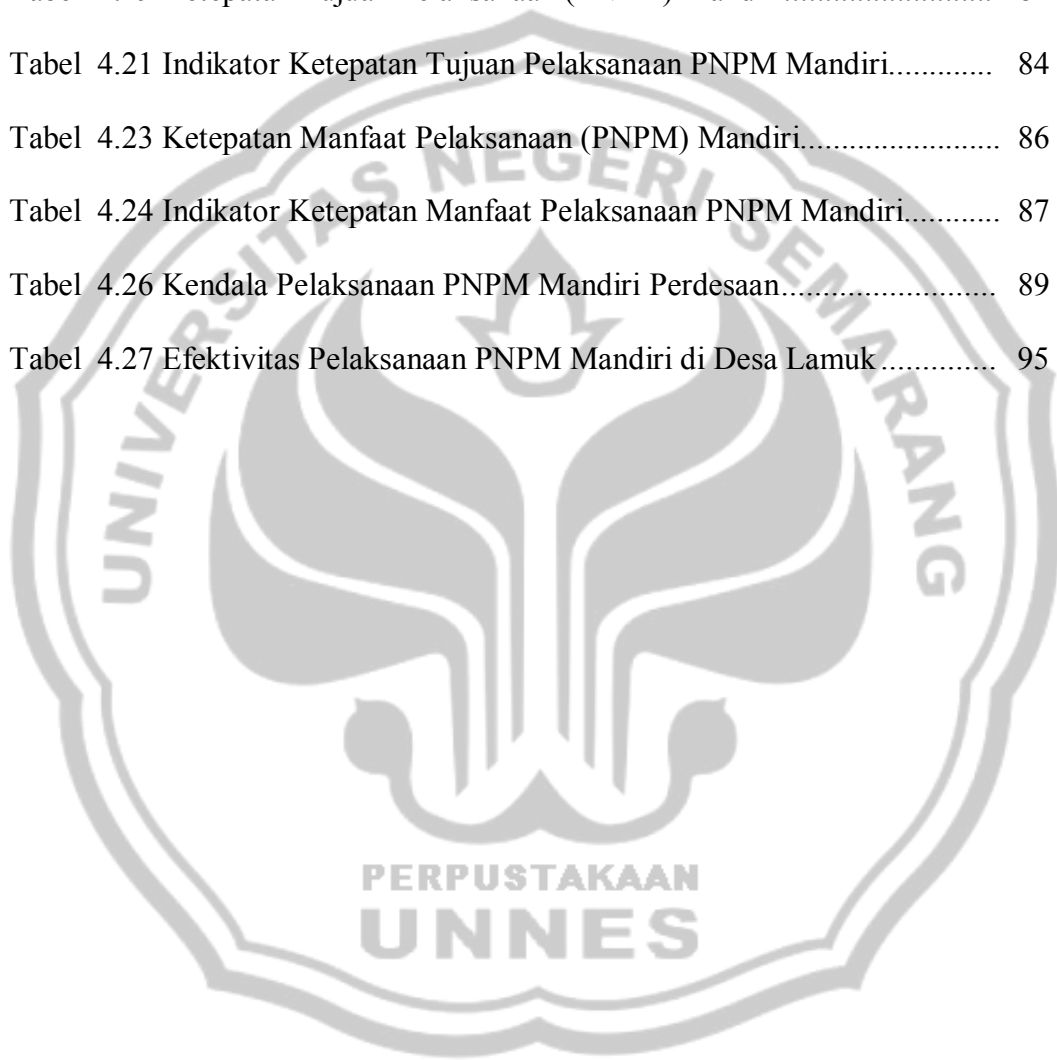
4.1.3. Hasil Yang Dapat Dicapai Dari Implementasi PNPM	
Mandiri di Desa Lamuk.....	81
4.1.3.1. Ketepatan Sasaran.....	81
4.1.3.2. Ketepatan Tujuan.....	84
4.1.3.3. Ketepatan Manfaat.....	86
4.1.4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PNPM	
Mandiri.....	88
4.1.4. Solusi Dalam Menghadapi Kendala Yang Ada.....	92
4.2. Pembahasan.....	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Simpulan.....	98
5.2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, KK Miskin, dan KK Sejahtera.....	4
Tabel 2.1. Jenis Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan.....	16
Tabel 3.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk.....	50
Tabel 3.3 Metode Pengumpulan Data.....	53
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket	55
Tabel 3.4 Metode Analisis data	57
Tabel 3.5 Kategori Deskriptif Persentase.....	59
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan	61
Tabel 4.2 Jenis Lantai Tempat Tinggal Keluarga Miskin	62
Tabel 4.3 Jenis Dinding Tempat Tinggal Keluarga Miskin	63
Tabel 4.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Keluarga Miskin.....	64
Tabel 4.5 Jenis Bahan Bakar Keluarga Miskin.....	65
Tabel 4.6 Konsumsi Daging Bagi Keluarga Miskin.....	66
Tabel 4.7 Konsumsi Ayam Keluarga Miskin.....	67
Tabel 4.8 Konsumsi Susu Keluarga Miskin.....	68
Tabel 4.9 Frekuensi Pembelian Pakaian Keluarga Miskin.....	69
Tabel 4.10 Frekuensi Makan Keluarga Miskin.....	70
Tabel 4.11 Akses Kesehatan Keluarga Miskin.....	71
Tabel 4.12 Jumlah Penghasilan Keluarga Miskin	72
Tabel 4.13 Tingkat Pendidikan Keluarga Miskin.....	73
Tabel 4.13 Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri Perdesaan.....	77

Tabel 4.14 Proporsi Jumlah Dana Program PNPM Mandiri.....	78
Tabel 4.15 Realisasi Dana PNPM Mandiri.....	79
Tabel 4.17 Ketepatan Sasaran Pelaksanaan (PNPM) Mandiri.....	82
Tabel 4.18 Indikator Ketepatan Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri.....	83
Tabel 4.19 Ketepatan Tujuan Pelaksanaan (PNPM) Mandiri.....	84
Tabel 4.21 Indikator Ketepatan Tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri.....	84
Tabel 4.23 Ketepatan Manfaat Pelaksanaan (PNPM) Mandiri.....	86
Tabel 4.24 Indikator Ketepatan Manfaat Pelaksanaan PNPM Mandiri.....	87
Tabel 4.26 Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.....	89
Tabel 4.27 Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk.....	95



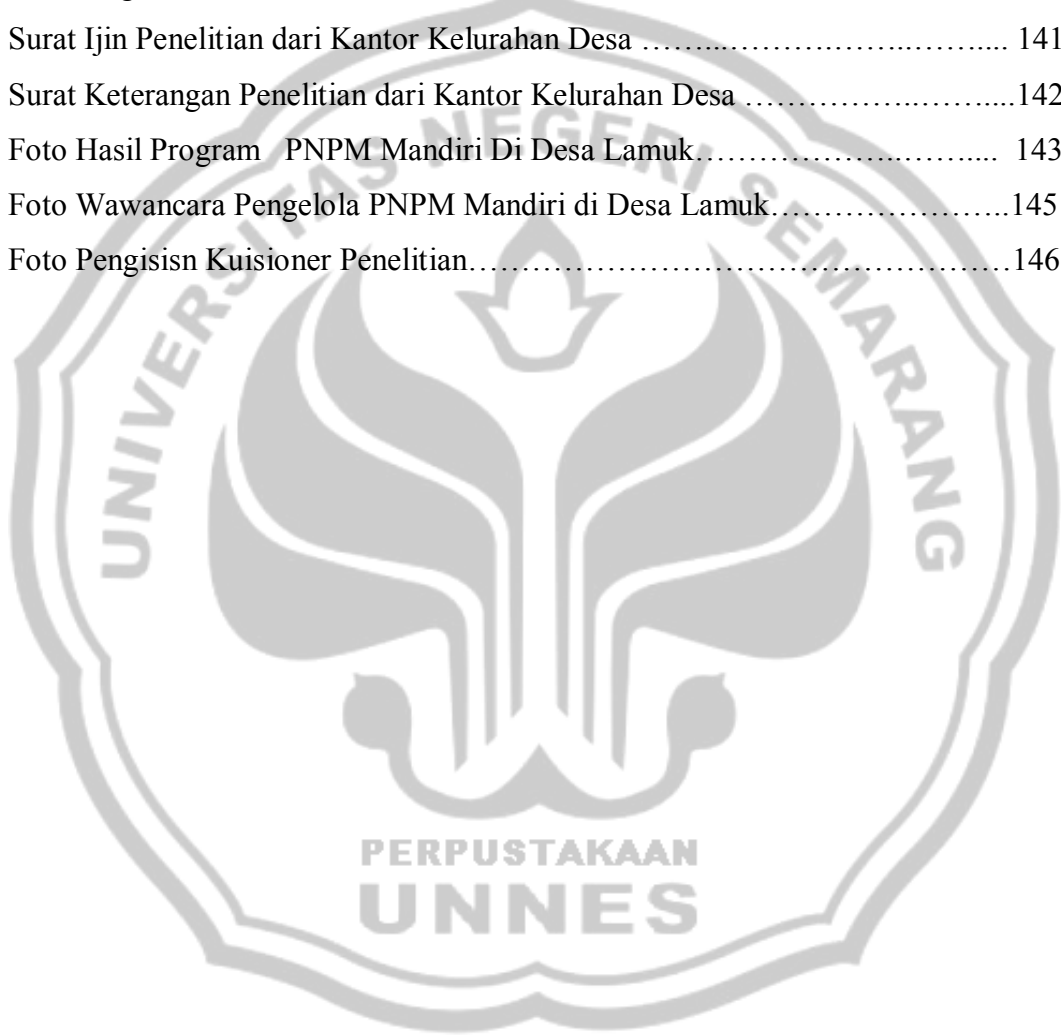
DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan.....	10
Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse.....	15
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	48
Gambar 4.1 Proporsi Dana PNPM Mandiri.....	77
Gambar 4.2 Realisasi Dana PNPM Mandiri.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian	104
Pedoman Wawancara	117
Perhitungan Validitas Angket Penelitian	118
Perhitungan Realibilitas Angket Penelitian	120
Data Tingkat Kefektivitasan Pelaksanaan PNPM Mandiri Di Desa Lamuk.....	121
Surat Ijin Penelitian dari Kantor Kelurahan Desa	141
Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kelurahan Desa	142
Foto Hasil Program PNPM Mandiri Di Desa Lamuk.....	143
Foto Wawancara Pengelola PNPM Mandiri di Desa Lamuk.....	145
Foto Pengisian Kuisisioner Penelitian.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu kemiskinan. Dan yang seperti kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-masalah baru, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan social, masalah kesehatan dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.

Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti Indonesia. Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat kompleks, kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Problem kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi, tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang terus bertambah, masalah gizi dan kesehatan masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh pemerintahan yang korup yang memiskinkan masyarakatnya. Oleh karenanya, kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global, merupakan problem yang harus segera

dituntaskan, baik oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketika dihadapkan pada kondisi nyata masyarakat Indonesia, langkah lebih bijak apabila pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas masyarakat Indonesia. Disini diharapkan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan pada masyarakat tetapi lebih kepada mengubah pola pikir masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung pasrah dalam menghadapi kenyataan hidup dan cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah, hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi pasif, malas dan lebih suka menerima daripada memberi, sama artinya dengan lebih suka mencari kerja daripada membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Indonesia selalau ada dalam bayang kemiskinan.

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri

Perdesaan merupakan pengembangan dari program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program lanjutan dari PPK dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin sebanyak 250.6000 KK.

Jumlah penduduk Kecamatan Kejobong pada tahun 2008 berjumlah 47.510 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 23.783 jiwa dan perempuan sebanyak 23.727 jiwa. Jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 5.695 KK (Laporan Kependudukan Kecamatan Kejobong 2008).

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kecamatan Kejobong

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK			Jumlah KK (RTM)
		L	P	L + P	
1.	BANDINGAN	2.693	2.658	5.351	483
2.	LAMUK	1.833	1.665	3.498	707
3.	SOKANEGARA	1.592	1.528	3.120	420
4.	GUMIWANG	1.218	1.208	2.426	345
5.	KRENCENG	1.800	1.723	3.523	389
6.	NANGKASAWIT	829	840	1.669	248
7.	PANDANSARI	1.902	1.831	3.733	415
8.	KEJOBONG	2.586	2.675	5.261	589
9.	LANGGAR	3.054	3.122	6.176	498
10.	TIMBANG	1.714	1.644	3.358	442
11.	NANGKOD	1.351	1.383	2.734	343
12.	KEDARPAN	1.050	1.080	2.130	275
13.	PANGEMPON	2.161	2.370	4.531	541
	JUMLAH	23.783	23.727	47.510	5695

(Laporan Kependudukan Kec. Kejobong 2008).

Pada tingkat desa, Desa Lamuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Kejobong dengan jumlah rumah tangga miskin yang tertinggi yaitu berjumlah 707 KK dari 5.695 KK se Kecamatan Kejobong.

Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk, KK Miskin, dan KK Sejahtera Tahun 2005-2008 :

Tahun	Jumlah KK	KK Sejahtera	KK Miskin	Prosentase	
				KK Sejahtera	KK Miskin
2005	938	335	603	35,7%	64,3%
2006	948	292	656	30,8%	69,2%
2007	985	289	696	29,3%	70,7%
2008	1024	317	707	30,9%	69,1%

Sumber : Dokumentasi Potensi dan perkembangan Desa Lamuk

Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah keluarga miskin di Desa Lamuk bertambah mengikuti kenaikan jumlah penduduk. Untuk mengetahui kenaikan jumlah penduduk dan jumlah KK miskin di Desa Lamuk pada tahun dapat dilihat pada tabel diatas, Perkembangan jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk terus mengalami kenaikan yaitu 603 KK pada tahun 2005, mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebanyak 656 KK. Pada tahun 2007 terus meningkat menjadi 696 KK, dan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan menjadi 707 KK.

Sebagaimana daerah-daerah lain maka PNPM di Desa Lamuk merupakan program pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan di daerah pedesaan. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sosial dasar dan ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pada

akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Implementasi Program PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana hasil yang dapat dicapai dari Implementasi PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di Desa Lamuk?
4. Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola program?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
2. Untuk mengetahui Implementasi Program PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
3. Untuk mengetahui hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di Desa Lamuk
4. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola program.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa Lamuk dengan adanya program PNPM tersebut agar dapat meningkatkan kesadaran kritisnya pada pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan kemandirian dalam upaya mengatasi penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemerintah mengenai pelaksanaan dari program PNPM sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Konsep kemiskinan

Secara etimologi, “kemiskinan” berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan akan sandang-pangan- papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosial - ekonomi, sosial-budaya, dan sosial-politik tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (Mubyarto, 1997 : 35).

Menurut Departemen Sosial dan BPS, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai estándar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (Nurhadi, 2007:13).

Bappenas dalam Sahdan (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi (Widodo, 2006:296) , yaitu :

a. Kemiskinan politik.

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

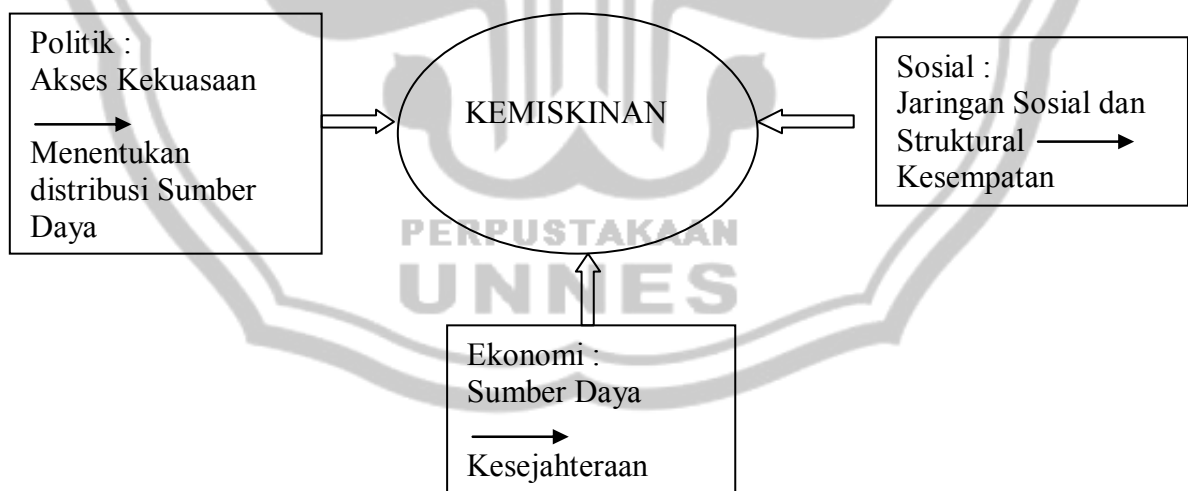
b. Kemiskinan sosial.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas

seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan
(sumber. Tri Widodo, 2006 : 296)

Arsyad (1997:219) membedakan kemiskinan menjadi dua yaitu :

- a. Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang jumlahnya terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah.
- b. Kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan buatan kini populer disebut kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal itu dapat dikarenakan karena pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidakseimbangan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam pembangunan (Arsyad dalam Tri Widodo,2006:297).

Beberapa konsep kemiskinan di Indonesia telah diberikan oleh banyak ahli. Berikut ini adalah beberapa di antaranya (Widodo,2006:297) :

- a. Pengertian konsep kemiskinan menurut Sajogyo adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Prayitno, 1998 :98)
- b. Sedangkan menurut Emil Salim kemiskinan adalah keadaan penduduk yang meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal yang memadai, luas tanah dan sumber alam yang cukup, keaslian dan

ketrampilan yang tinggi, kondisi fisik dan rohaniah yang baik, dan rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan (Cahyono, 1993:1)

c. Soemitro Djoyohadikusumo juga mengemukakan pengertian mengenai konsep kemiskinan. Menurut Soemitro, kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup rendah dan tertekan. Ini merupakan akibat dari serangkaian keganjilan dan kepincangan yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka susunan masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah, yaitu (Prayitno, 1998:190):

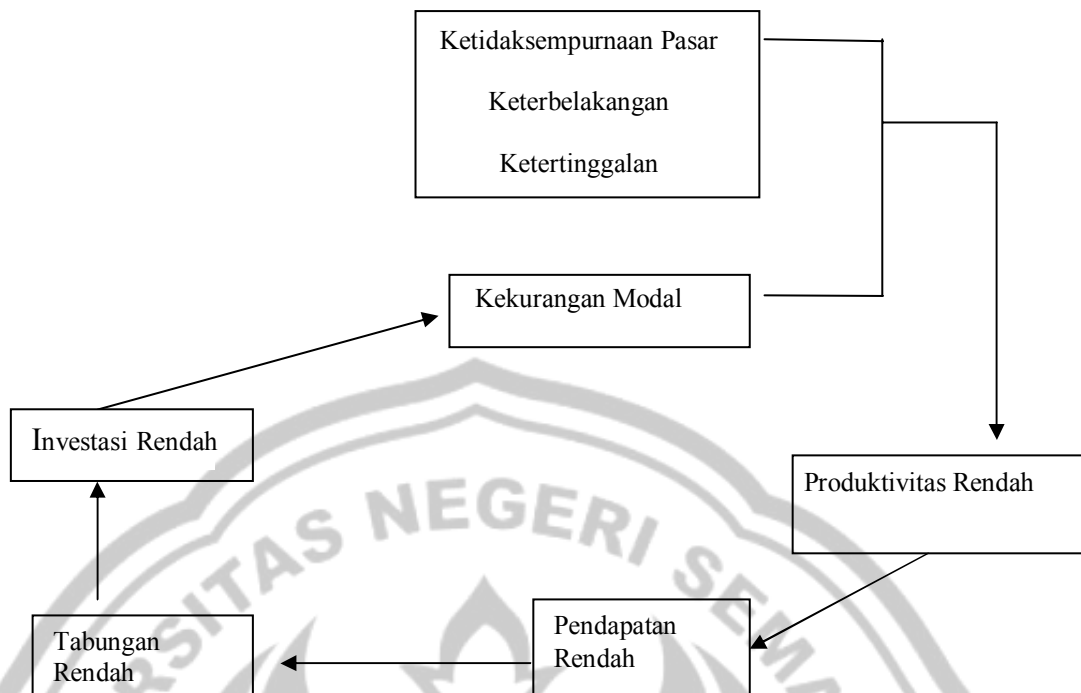
- 1) Keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sebagai sumber produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal dan ketrampilan.
- 2) Kepincangan sebagai sektor ekonomi, modal dan penggunaan teknologi. Di masa lampau dilakukan paling intensif justru di sektor- sektor yang terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Pada umumnya, ukuran kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Sharp, et.al dalam Kuncoro (2003:131) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumber daya manusia*. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal*.

Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Lihat gambar 2.2). Logika ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, di tahun 1953 yang mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”* (negara itu miskin karena dia miskin).



Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Arsyad dalam Tri Widodo, 2006: 298)

a. Kemiskinan Absolut

Dalam konsep ini kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Apabila pendapatan tersebut tidak mencapai kebutuhan minimum, maka dapat dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin

atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum, hal itu dikarenakan garis kemiskinan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat pendapatan masyarakat berubah.

Menurut Lincoln Arsyad (1999 : 240 – 242) beberapa indikator kemiskinan antara lain:

(1) Tingkat konsumsi beras

Menurut Prof. Sajogyo (1997 : 11), ada konsumsi beras tertentu untuk membedakan tingkat kemiskinan, dan dibedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

Tabel 2.1. Jenis Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan :

Jenis kemiskinan	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 Kg	270 Kg
Sangat miskin	240 Kg	360 Kg
Miskin	320 Kg	480 Kg

(2) Tingkat Pendapatan

Menurut BPS, ada perbedaan batas miskin di daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan menggunakan konsep pengeluaran, BPS menentukan garis kemiskinan dengan cara melihat besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan bakar.

(3) Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Pada publikasi United Nation (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Level of Living : An Interim Guide*, menyarankan 9 komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Komponen-komponen tersebut adalah kesehatan, konsumsi bahan bakar, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Pada empat komponen yang

terakhir untuk diidentifikasi, diukur, dan diperbandingkan antar daerah atau antar waktu (Asmara, H 1986 : 259).

(4) Indikator Pengeluaran Rumah Tangga

Hendra Asmara mencoba merevisi garis kemiskinan pedesaan perkotaan yang dirumuskan Sajogya. Menurut Asmara, garis kemiskinan dapat dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada kelompok barang dan jasa kebutuhan pokok seperti yang diungkapkan dalam data Susenas. Ternyata, ukuran yang dipakai Asmara mampu menangkap dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi.

Beberapa kriteria kemiskinan menurut BPS (2005) adalah sebagai berikut :

- (1) Pangan : Makan sehari kurang dari 3x
- (2) Sandang : Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk bepergian dan di rumah (tidak ada pakaian pengganti).
- (3) Papan : Tempat tinggal tidak permanen (sebagian besar bukan tembok dan tidak ada listrik).
- (4) Kesehatan : Tidak mampu berobat ke puskesmas / RSUD
- (5) Pendidikan : Tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar atas biaya sendiri.
- (6) Orang terlantar di panti wreda dan yatim piatu.

Catatan : 1,2,3,4 dan 5 karena alasan ekonomi

Menurut BPS (2005), penduduk dikatakan sangat miskin apabila mencapai 1900 kalori per hari plus kebutuhan dasar non ekonomi, atau setara dengan Rp.120.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila

kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori per orang per hari plus kebutuhan-kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.150.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin mendekati miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.175.000,00 per orang per bulan.

Sedangkan menurut Sutari Imam Bernadib dalam Kurniawati (2002 : 17) kebutuhan keluarga dibagi menjadi tujuh tingkatan :

(1) Kebutuhan pangan dan gizi

Makanan merupakan faktor penting untuk memelihara kesehatan pertumbuhan tubuh karena betapapun kita kaya atau berkedudukan tinggi dan berpangkat serta serba kecukupan tetapi apabila hidupnya sering sakit-sakitan niscaya tidak akan bahagia.

(2) Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan perumahan juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Bidang perumahan merupakan bidang yang ikut menentukan terwujudnya keluarga karena adanya perumahan para anggota keluarga akan bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan misi dan tugas yang harus diselesaikan. Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena orang yang tidak memiliki rumah biasanya hidupnya tidak tenang.

(3) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena masalah pakaian adalah masalah kemampuan, keserasian, kesesuaian, dan kewajaran.

(4) Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang perlu jasmani dan rohani yang sehat, karena orang yang jasmani dan rohaninya sehat dapat melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang lebih daripada orang yang kurang sehat, untuk itu diperlukan pelayanan kesehatan, misalnya orang tersebut perlu mendapatkan perawatan oleh dokter. Jadi kebutuhan pelayanan kesehatan diperlukan setiap orang juga setiap keluarga.

(5) Kebutuhan Memperoleh Pendidikan

Setiap manusia membutuhkan pendidikan baik formal maupun non formal karena dengan pendidikan manusia akan memiliki wawasan dan pola pikir yang luas dan maju. Oleh karena itu pendidikan makin terasa penting.

(6) Kebutuhan Pekerjaan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan berarti taraf hidupnya akan lebih baik.

(7) Kebutuhan Olahraga dan Rekreasi

Dengan berolahraga dan rekreasi maka akan tercipta kesehatan jasmani dan rohani. Sebab dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan olahraga dan rekreasi baik jasmani dan rohani dapat dihindarkan dari ketegangan otak.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin. Menurut Kartasmita dalam Widodo (2006 :297) kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu :

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sharp, et.al dalam Mudrajat (2003 : 131) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu :

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanay ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan kebijakan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu diperlukan juga sikap yang tidak memberlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun hanya sedikit (Bayo Ala, 1981:31). Pemberdayaan adalah proses transformasi dengan upaya penggalan segenap potensi yang ada menjadi lebih bermanfaat, maka diperlukan sebuah strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan terutama masyarakat miskin.

2.2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu :

- a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (*pro-poor*).
- b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat diharapkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.

Kartasmita (1995:18) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dengan tiga langkah :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*enabling*)
- b. Memperkuat potensi alat daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
- c. Melindungi (*protecting*).

Sehingga proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Mubyarto (1997:6) mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi rakyat, pengertian ekonomi rakyat yang dikembangkan tersebut menjadi suatu gerakan terhadap pemerintah dan para ahli ekonomi untuk kembali mengingatkan bahwa akar dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin parah ini adalah rakyat itu sendiri. Dalam ekonomi rakyat terhadap usaha yang bersifat

mandiri yang merupakan ciri khas dari usaha ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat ini dilakukan tanpa modal yang besar dan dengan cara-cara swadaya. Dalam konteks permasalahan paling sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk miskin baik di desa maupun di kota.

Pada bagian lain Mubyarto (1997:282) mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Selama masih ada kemiskinan yang luas dikalangan rakyat jelata, pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bekerja keras untuk memeranginya. Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 “faqir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, artinya negara belum dapat dianggap melaksanakan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia dalam kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sebelum benar-benar mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat dalam Indonesia merdeka harus merasakan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran.

2.2.2 Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Moeljarto (1993:34) mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam pemberdayaan masyarakat miskin :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah konkrit adalah meningkatkan kesadaran kritis

masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial politik dimana orang miskin tersebut tinggal.

- b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin, artinya membiarkan kesadaran kritis orang miskin muncul untuk melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.
- c. Menanamkan rasa kebersamaan dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi penjelmaan konstruksi sosial.
- d. Merealisisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh
- e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
- f. Perlunya redistribusi prasarana pembangunan yang lebih merata.

2.2.3 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam buku panduan teknis PNPM Mandiri, kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Kebijakan tidak langsung

Kebijakan yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan hidup seperti, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup.

- b. Kebijakan langsung

Kebijakan pada pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa

pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

c. Kebijakan khusus

Kebijaksanaan yang diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat.

2.3 KONSEP KESEJAHTERAAN

Kemakmuran seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan negara. Secara konseptual, kemakmuran dapat berarti kemampuan individu, kelompok atau negara untuk menyediakan pemukiman, nutrisi dan barang-barang material lainnya yang dapat membuat masyarakat hidup dengan layak. Setiap orang bahkan negara sekalipun dapat memiliki usuran kemakmuran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah memahami kemakmuran sebagai sebuah gambaran dari kesehatan emosional dan kehidupan spiritual masyarakat yang akhirnya akan membawa pada kondisi meningkatnya produktivitas masyarakat tersebut. Konsep kemakmuranpun tidak terlepas dari kesejahteraan .

Kemakmuran maupun kesejahteraan sebuah masyarakat merupakan cermin kualitas hidup masyarakat tersebut. Teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan akan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari semakin besarnya konsumsi mereka. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow in come*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya

memiliki pendapat sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Amelia Marka, 2006: 1-2).

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan di masyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi social politik maupun ekonomi masyarakat tersebut.

Salah satu isu yang perlu diperhatikan hadala konsep kesejahteraan. Pengukuran konsep kesejahteraan setidaknya memiliki dua bentuk pengukuran, yaitu objektif dan subjektif. Konsep kesejahteraan objektif atau kesejahteraan absolut merupakan informasi yang berasal dari daerah pengukuran kualitas hidup secara objektif. Sementara itu, kesejahteraan subjektif atau kesejahteraan relatif merupakan persepsi individu yang merupakan hasil dari respon mental maupun keadaan emosi seseorang terhadap kualitas hidup mereka. Konsep kesejahteraan perlu dilihat dari dua sisi karena pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan objektif dan subjektif akan meningkatkan level kemakmuran nasional (Amelia Marka, 2006: 4-5).

2.3.1 Indikator Kesejahteraan

Menurut Widodo (2006: 299) indikator kesejahteraan berkait erat dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah terpenuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran.

Disamping itu melalui dimensi moneter, kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi non moneter misalnya kesehatan, pendidikan dan partisipasi sosial. lebih jelasnya sebagai berikut :

2.3.1.1 Dimensi Moneter

Ketika mengukur kesejahteraan melalui dimensi moneter, pendekatan yang bisa dilakukan melalui pendapatan dan konsumsi sebagai indikator kesejahteraan. Diantara pendekatan pendapatan dan konsumsi, konsumsi adalah indikator yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Widodo, 2006:299):

- 1) Konsumsi saat ini (*current consumption*) lebih erat hubungannya dengan kesejahteraan seseorang yaitu berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan minimumnya
- 2) Pendapatan lebih sering berfluktuasi untuk beberapa mata pencaharian tertentu.
- 3) Konsumsi lebih mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Pengeluaran untuk konsumsi tidak hanya mencerminkan barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan pendapatannya, tetapi juga kemampuannya untuk memperoleh kredit dan menabung pada saat pendapatannya rendah dibawah rata-rata.

2.3.1.2 Dimensi Non Moneter

Kesejahteraan biasanya diukur melalui dimensi moneter, Namun demikian kesejahteraan juga bisa diukur melalui dimensi non moneter. Hal ini terjadi karena kesejahteraan tidak hanya mencukupi kebutuhan ekonomi, yaitu social, budaya, dan politik misalnya kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, hak suara, tingkat melek huruf dan lain-lain.

1) Indikator nutrisi dan kesehatan

Status kesehatan anggota rumah tangga dapat dijadikan indikator kesejahteraan. Selain kesehatan anggota rumah tangga, indikator kesehatan ini dapat diproduksi melalui pusat-pusat kesehatan, akses terhadap kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Indikator kesehatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar yang telah dipenuhi oleh seseorang yang tidak hanya meliputi kebutuhan dasar lain yaitu kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih, dan lain-lain.

2) Indikator pendidikan

Indikator pendidikan ini dapat diproduksi melalui tingkat melek huruf, lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan akhir anggota rumah tangga, dan lain-lain. Pendidikan ini berkaitan dengan *human capital* yang merupakan nilai tambah bagi orang tersebut untuk terlibat aktif dalam perekonomian.

3) Indikator partisipasi sosial

Peran serta anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan cerminan dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan aktualisasi dalam masyarakat.

2.4 Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

2.4.1 Pengetian Efektivitas

Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan itu efektivitas program sangat tergantung dari keputusan yang diambil. Banyak anggapan bahwa efektivitas sama dengan efisiensi padahal kedua istilah itu berbeda dengan pendapat sebagai berikut : efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Seorang manajer yang efisien adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performan) dibandingkan masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, modal dan waktu) yang digunakan. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil kebijakan (pemerintah, pemimpin perusahaan) yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan (Handoko, 1997 : 7)

Dari pendapat tersebut diatas jelas bahwa efektivitas berhubungan dengan hasil yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak dicapai. Suatu

usaha dikatakan efektif apabila membuahkan hasil yang diinginkan dan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan efek atau akibat seperti yang dikehendaki dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Bagi para pengambil kebijakan, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut (Handoko, 1997 : 7).

Dalam mencapai suatu tujuan ada empat kemungkinan yang bias terjadi antara lain :

- a. Efektif dan efisien, ini yang paling baik.
- b. Efektif tetapi tidak efisien, ini berarti kurang menguntungkan.
- c. Efisien tetapi tidak efektif, ini berarti tujuan tidak tercapai.
- d. Tidak efektif dan tidak efisien. Kemungkinan yang paling buruk dan sangat merugikan (Sriyadi, 2001 : 3).

2.4.2 Alat untuk mengukur efektivitas program

Untuk mengukur efektivitas program penganggulangan kemiskinan di pedesaan adalah

- a. Ketepatan Sasaran program, semakin tinggi presentase masyarakat miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan berarti semakin efektif.
- b. Manfaat program, semakin tinggi manfaat yang dapat diperoleh penerima program maka proram tersebut semakin efektif.
- c. Tujuan program, semakin tinggi presentase masyarakat miskin yang mengerti dan jelas program penanggulangan kemiskinan berarti semakin efektif.
- d. Ketepatan penggunaan dana, semakin tinggi presentase penggunaan dana bantuan program kemiskinan untuk usaha produktif berarti semakin efektif.
- e. Pengembalian dana, semakin tinggi presentase pengembalian dana bantuan program oleh masyarakat miskin berarti semakin efektif.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

2.2.1 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

2.2.2 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Lokasi sasaran: Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan : (a) Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam PPK”; (b) Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema *kontribusi pendanaan*.

Kelompok sasaran: (a) Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan; (b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan; (c) Kelembagaan pemerintahan lokal.

2.2.3 Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu pada ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan bagi

masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :

2.5.3.1 Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan - kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas didanai

Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan, karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial ekonominya.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster.

Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.

2.5.3.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat
- d. didukung oleh sumber daya yang ada
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

2.5.3.3 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Adapun pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan bergulir PNPM tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan satu-satunya pengelola administrasi BKM, sementara pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang BKM. Selama masa proyek, BKM tidak diperkenankan membentuk unit usaha lain yang bertindak sebagai pengelola keuangan selain UPK.
- (2) Seluruh dana bergulir yang berasal dari BLM harus dikelola oleh UPK. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai KSM berikut yang telah dinyatakan layak oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) selama masih bekerja. Untuk itu, pelayanan UPK agar mengenakan pendekatan pembentukan KSM sehingga pelayanan individu oleh UPK tidak diperkenankan.
- (3) KSM yang dapat menerima dana bergulir adalah:
 - (a) KSM baru yang belum pernah memperoleh pembiayaan PNPM baik untuk kepentingan usaha/ ekonomi maupun untuk prasarana fisik (prioritas).
 - (b) KSM lama yang sudah melunasi pinjaman dan mempunyai catatan pengembalian yang baik dan masih membutuhkan modal untuk pengembalian lebih lanjut.
 - (c) KSM lama dimana pencairan tahap sebelumnya belum dapat memenuhi pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya.

- (d) Selain hal tersebut di atas, dana bergulir dapat dipergunakan untuk kepentingan pelatihan baik berupa hibah maupun berupa pinjaman, tergantung jenis, tujuan serta penerima manfaat tujuan tersebut. Hal ini diusulkan oleh KSM sesuai dengan aturan yang ada di dalam manual.
- (4) Selama KMW masih bekerja, semua usulan dari KSM yang akan memanfaatkan dana bergulir tetap harus diajukan kepada KMW melalui Faskel. Sebagian besar dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) yang disalurkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) usaha / ekonomi maupun untuk kepentingan pelatihan sudah dibayar kembali ke masyarakat melalui KSM. Kemajuan perkembangan terakhir ini sesuai dengan tujuan P2KP.
- (5) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak oleh KMW tetap diserahkan kepada BKM untuk membuat skala prioritas dan membuat berita acara yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Faskel.
- (6) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak dan memperoleh prioritas BKM segera ditindaklanjuti oleh UPK tanpa melalui Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) maupun KPKN. Meskipun demikian dianjurkan untuk melaporkan kemajuan kepada PJOK.
- (7) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir ini, tidak diwajibkan lagi dana insentif 2 persen untuk Faskel yang berasal dari dana bergulir tersebut. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- (8) Tanggungjawab pengelolaan dana bergulir berada di tangan BKM dan dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota lengkap BKM. Diharapkan

petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana bergilir P2KP dapat dijadikan sebagai acuan bagi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun KMW.

2.5.3.4 Kriteria Penerima Dana PNPM

Kriteria bagi berhak menerima dana bantuan PNPM adalah :

(1) Memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP)

Dengan memiliki KTP, maka dapat dibuktikan sebagai penduduk yang tinggal di dalam wilayah pemerintah daerah setempat. Jika terdapat anggota masyarakat yang tidak memiliki KTP karena berbagai alasan, tetapi keberadaan dan eksistensinya dapat diterima oleh warga setempat, maka atas persetujuan BKM dapat didaftarkan menjadi penerima dana bantuan PNPM.

(2) Kepala Keluarga Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang Kepala Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan ataupun tidak tetap dapat didaftarkan menjadi penerima dana PNPM karena penghasilan yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya.

(3) Istri Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang istri merupakan penndamping kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membantu kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, istri yang tidak memiliki pekerjaan dapat didaftarkan sebagai penerima dana PNPM.

(4) Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga Banyak

Semakin banyak jumlah anggota kelurga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, jumlah

tanggung dalam keluarga banyak namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka keluarga tersebut dapat didaftarkan menjadi penerima dana PNPM.

(5) Tidak Memiliki Rumah Sendiri

Keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri dapat digolongkan dalam penerima dana PNPM karena tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan papan (memiliki tempat tinggal sendiri).

(6) Kondisi Rumah/Tempat Tinggal

Kondisi rumah/tempat tinggal mencerminkan kondisi ekonomi dalam suatu keluarga, kondisi rumah tidak layak huni dapat didaftarkan menjadi penerima dana PNPM.

2.5.3.5 Komponen-Komponen Program yang didanai PNPM

Komponen-komponen program yang didanai PNPM adalah :

(1) Komponen Fisik

Komponen fisik meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang dibutuhkan masyarakat kelurahan setempat. Beberapa jenis komponen fisik yang dapat diusulkan, misalnya :

- (a) Perbaikan dan peningkatan jalan dan lingkungan
- (b) Ruang terbuka hijau atau taman
- (c) Sarana dan prasarana bagi peningkatan ekonomi masyarakat
- (d) Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.

(2) Komponen kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Kegiatan ekonomi skala kecil meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha kecil lainnya yang dilakukan perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM. Tidak ada pembatasan dalam jenis usaha dalam memperoleh kredit tambahan modal usaha, penempatan di lembaga keuangan, produksi/penjualan obat terlarang, senjata dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan, pembebasan lahan serta pembiayaan administrasi pemerintah.

(3) Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan setempat. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah:

1. mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya
2. kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM

Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya

3. inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah)
4. inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke desa, dll

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dll), pertemuan adat istiadat; (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri

Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok
- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.

2.2.5 Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

<i>Jumlah Desa Tertinggal</i>	<i>Alokasi BLM (Rupiah)</i>
< 3	1.000.000.000
4	1.250.000.000
5	1.500.000.000
6	1.500.000.000
7	1.750.000.000
8	2.000.000.000
9	2.250.000.000
10	2.500.000.000
11	2.750.000.000
> 12	3.000.000.000

a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal

Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan

Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lokasi	Jumlah	Persen	Alokasi BLM
Jawa	< 25.000	<=40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	25.000-50.000	<=40%	1.750.000.000
		> 40%	2.000.000.000
	> 50.000	< 20%	2.250.000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
Luar Jawa	< 15.000	<=40%	1.500.000.000
		> 40%	1.750.000.000
	15.000-25.000	<=40%	1.750.000.000
		> 40%	2.000.000.000
	> 25.000	< 20%	2.250.000.000
		20% sd 40%	2.500.000.000
	> 40%	3.000.000.000	

Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan,

Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Swadaya masyarakat
- d. Partisipasi dunia usaha

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sbb:

- a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi
- b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.

2.2.6 Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu
- b. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu
- c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN
- d. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya

2.5.6.1 Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya)

- c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

2.5.6.2 Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH., MA “Beberapa Permasalahan Dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat yang ada selama ini disinyalir kurang mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kesalahan dalam mendesain program tersebut. Selama ini, kebijakan pemberdayaan lebih banyak dikaitkan dengan program pemberian bantuan lunak secara bergilir yang kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat

lokal. Untuk itu, seharusnya program pemberdayaan harus memenuhi 5 (lima) kategori pemberdayaan yaitu aspek-aspek ekonomis, sosial budaya, politis administratif, serta prasarana. Hal lain yang dibutuhkan untuk mengakselerasi 5 kategori pemberdayaan ini adalah kemauan pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Roosgandha E.M. dan Valeriana Darwis “ Karakteristik Petani Miskin Dan Persepsinya Terhadap Program Jaring Pengaman Sosial di Propinsi Jawa Timur” Hasil dari penelitian ini yaitu Salah satu dampak krisis ekonomi adalah peningkatan jumlah populasi kemiskinan di Indonesia, berdasarkan pada data BPS tahun lalu yaitu 1998, jumlah kemiskinan yang ada yaitu sekitar 49,5 juta orang. Untuk meminimalisir pertumbuhan kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik apa yang melekat pada warga miskin dan bagaimana persepsi mereka terhadap program Jaring Pengaman Sosial, surveinya dilakukan pada 160 responden kabupaten di Jawa Timur, hasil survei menunjukkan anggota, keluarga miskin adalah yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kebanyakan kerjanya di bidang pertanian. Dalam partisipasinya terhadap program Jaring Pengaman Sosial. Umumnya mereka melakukan apapun yang dikatakan oleh Pemerintah karena mereka tidak tahu banyak mengenai program tersebut, meskipun ada beberapa kelemahan namun mereka masih tetap menikmati dan berharap programnya akan berlangsung lama.

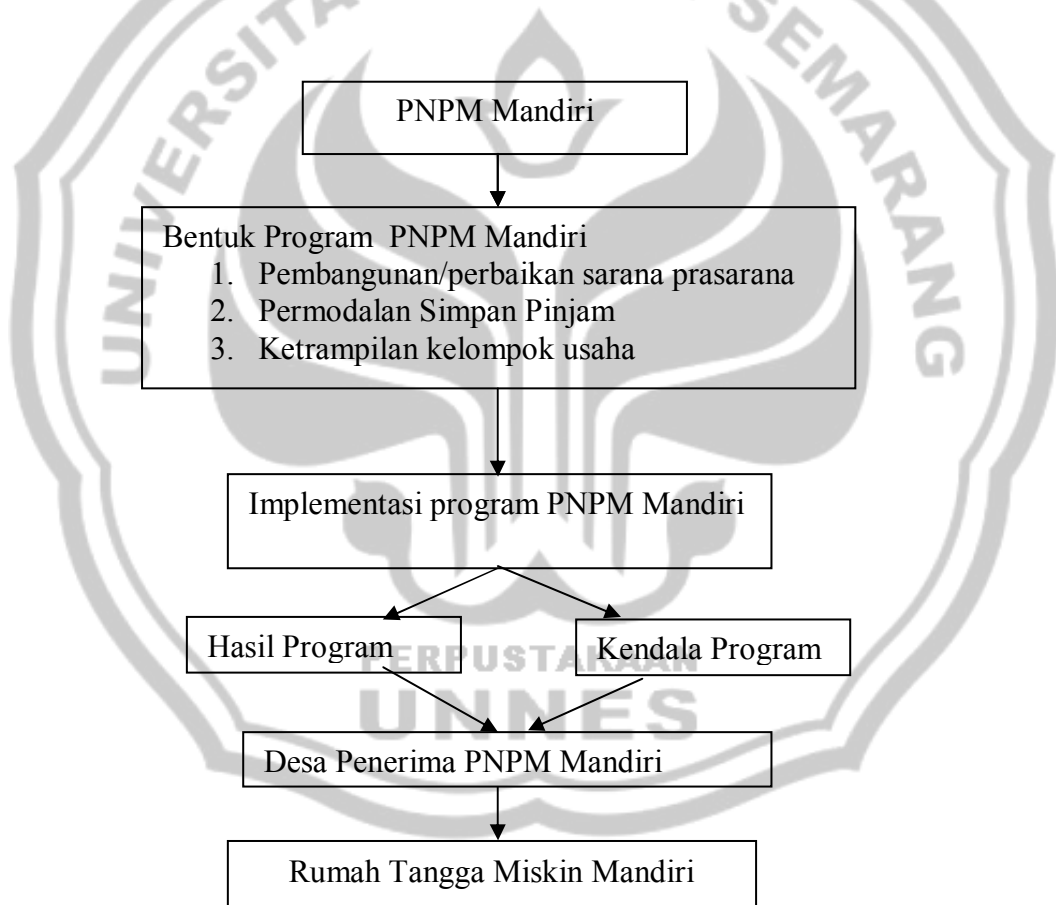
2.7 Kerangka Berfikir

Kemiskinan mengandung banyak pengertian, dan telah dideskripsikan dalam berbagai perspektif. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas yang dihasilkan juga rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah, dan akan menyebabkan kemiskinan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai berjalan dari tahun 2007. PNPM mandiri merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pembangunan/perbaikan sarana prasarana dasar, kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan kelompok usaha, penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi penelitian pada kegiatan pembangunan fisik dan permodalan simpan pinjam, karena program pelatihan tidak dilaksanakan. Pendekatan PNPM mandiri perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan yang selama ini dinilai berhasil. Keberhasilan implementasi PNPM dilihat dari tujuan pelaksanaan program, selain itu efektifitas juga dinilai besar kecilnya manfaat dari program tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin dan dilihat dari ketepatan sasaran pelaksanaan program tersebut. Sasaran pelaksanaan disesuaikan dengan objek pelaksanaan program, dalam hal ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM).

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kelembagaan pemerintah lokal yang terkait yang tentunya diharapkan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Dengan adanya keterpaduan yang baik diantara hal tersebut, dengan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. Sehingga program ini sesuai dengan target atau tepat sasaran, yaitu ditujukan kepada rumah tangga miskin perdesaan.

Dari uraian kerangka berfikir diatas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.3 . Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Arikunto (2006 :130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang ada di Desa Lamuk, yang berjumlah 707 kepala keluarga yang tersebar dalam 10 RW dan 20 RT.

3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Dalam penelitian tidak semua populasi yang ada dijadikan objek penelitian. Untuk itu peneliti hanya mengambil sebagian dari populasi Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Proporsional area random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-masing bagian terambil sampelnya secara acak. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik proporsional area random sampling adalah sebagai berikut :

- (a) Menentukan populasi setiap RW
- (b) Menentukan Jumlah sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara menjumlahkan sampel-sampel masing-masing RW.
- (c) Mengambil dari setiap RW yang telah ditentukan sampelnya secara acak.

Penentuan sampel dihitung dengan rumus (Slovin dalam Husein, 1998:78-79):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{707}{1 + (707)(0,01)}$$

$$n = \frac{707}{8,07}$$

$$n = 87,6$$

$$n = 88$$

Dengan demikian, pengambilan sampel sebanyak 88 kepala keluarga sudah dianggap representatif. Adapun Perincian jumlah sampel yang diambil dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk

RW	Populasi	%	Sampel
I	50	7,07	6
II	61	8,63	8
III	69	9,76	9
IV	81	11,46	10
V	82	11,60	10
VI	76	10,75	9
VII	77	10,89	10
VIII	74	10,47	9
IX	72	10,18	9
X	65	9,19	8
Jumlah	707	100	88

3.3 Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi keluarga miskin di Desa Lamuk yaitu menggambarkan kondisi

keluarga miskin yang ada di Desa Lamuk, kondisi tersebut yaitu :

1. Pendidikan
2. Luas lantai tempat tinggal
3. Jenis lantai tempat tinggal
4. Jenis dinding tempat tinggal
5. Fasilitas buang air besar
6. Sumber air minum
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Konsumsi daging/susu/ayam dalam seminggu
9. Kemampuan membeli pakaian
10. Kemampuan makan dalam satu tahun
11. Akses kesehatan
12. Jumlah penghasilan
13. Jumlah tabungan

(b) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan di Desa Lamuk kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan.

Indikator pengukuran :

- (1) Pelaksanaan kegiatan
 - (2) Gambaran umum Implementasi PNPM
 - (3) Tahapan dan pelaksanaan program
 - (4) Jumlah dana yang dialokasikan
 - (5) Tahapan penyaluran dana
 - (6) Realisasi penyaluran dana
- (c) Hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk. Hasil dari pelaksanaan berupa ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan manfaat bagi pengentasan kemiskinan.
- (d) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Kendala yang dihadapi berupa hambatan dalam pelaksanaan (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk.
- Indikatornya antara lain pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksanan program.

3.4 Metode pengumpulan data

Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data

No	Masalah	Data Yang Diambil	Sumber	Metode Pengumpulan Data
1	Bagaimana profil Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?	Profil keluarga miskin di Desa Lamuk	Keluarga Miskin	Metode Kuesioner dan Metode Dokumentasi
2	Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan	Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan	Pengelola Program	Metode Wawancara, Metode Dokumentasi
3	Bagaimana Hasil yang dapat dicapai dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk ?	Hasil dari implementasi program PNPM mandiri yang dilaksanakan	Pengelola Program dan Keluarga Miskin	Metode kuesioner dan Metode Wawancara
4	Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola kegiatan?	Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di Desa Lamuk	Pengelola Program	Metode Wawancara

3.4.1 Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya (Arikunto, 2006:151). Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dan tingkat keberhasilan implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong.

3.4.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data dengan bersumber pada benda-benda tertulis yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa data keluarga miskin di Desa

3.4.3 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006:155). Metode ini digunakan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa Lamuk melalui program PNPM mandiri Perdesaan.

3.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data

3.5.1 Validitas/ kesahihan

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:144). Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah rumus korelasi *product moment*.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Ket : r_{xy} = koefisien korelasi

N= Jumlah responden

$\sum X$ = nilai skor butir

$\sum Y$ = nilai skor total

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat nilai X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat nilai Y

Apabila $r_{hit} > r_{tabel}$ berarti ada korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut valid.

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket

Butir Pertanyaan	r hitung (koefisien validitas)	r tabel 5%	Keterangan
Butir No.1	0,238	0,444	Tidak Valid
Butir No.2	0,497	0,444	Valid
Butir No.3	0,674	0,444	Valid
Butir No.4	0,462	0,444	Valid
Butir No.5	0,415	0,444	Tidak Valid
Butir No.6	0,615	0,444	Valid
Butir No.7	0,508	0,444	Valid
Butir No.8	0,661	0,444	Valid
Butir No.9	0,494	0,444	Valid
Butir No.10	0,673	0,444	Valid
Butir No.11	0,627	0,444	Valid
Butir No.12	0,499	0,444	Valid
Butir No.13	0,632	0,444	Valid
Butir No.14	0,560	0,444	Valid
Butir No.14a	0,485	0,444	Valid
Butir No.15	0,515	0,444	Valid
Butir No.16	0,683	0,444	Valid
Butir No.17	0,555	0,444	Valid
Butir No.18	0,507	0,444	Valid
Butir No.19	0,594	0,444	Valid
Butir No.20	#DIV/0!	0,444	Tidak Valid
Butir No.21	0,702	0,444	Valid
Butir No.22	0,646	0,444	Valid
Butir No.23	0,723	0,444	Valid
Butir No.24	0,513	0,444	Valid
Butir No.25	0,592	0,444	Valid
Butir No.26	0,659	0,444	Valid
Butir No.27	0,648	0,444	Valid
Butir No.28	0,519	0,444	Valid
Butir No.29	0,593	0,444	Valid
Butir No.30	0,631	0,444	Valid
Butir No.31	0,473	0,444	Valid
Butir No.32	0,461	0,444	Valid
Butir No.33	0,505	0,444	Valid
Butir No.34	0,503	0,444	Valid

Pada tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung tidak semuanya $\geq r$ tabel, yaitu butir no 1, 5 dan 20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ke-35 butir pernyataan tersebut yang valid hanya 32 butir.

3.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan instrumen tersebut baik (Arikunto, 2006:142).

Untuk mencari reliabilitas digunakan teknik uji dengan rumus alpha :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right)$$

Ket : r_{11} = reliabilitas instrumen

K = Banyak butir soal atau pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = jumlah varian butir

σ^2 = varian total

Untuk mencari varian tiap butir digunakan rumus :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X)^2 - \frac{\sum (X)^2}{N}}{N}$$

Ket : σ^2 = varian tiap butir

X = jumlah skor butir

N = jumlah responden

Apabila $r_{11} > r$ tabel berarti instrumen tersebut memenuhi syarat reliabilitas.

Dari hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen angket pada $\alpha = 5\%$ dengan $N = 20$ diperoleh r tabel = 0,444, dan dari perhitungan koefisien reliabilitas

diperoleh $r_{11} = 0,929$, sehingga $r_{11} > r$ tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ke 35 butir soal tersebut adalah reliabel.

3.6 Metode Analisis data

Tabel 3.4 Metode Analisis data

No	Masalah	Metode Analisis Data
1	Bagaimanakah profil Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?	Analisis Deskriptif Persentase
2	Bagaimana implementasi program PNPM di Desa Lamuk?	Analisis Deskriptif
3	Bagaimana Hasil yang dapat dicapai dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk ?	Analisis Deskriptif Persentase
4	Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola kegiatan?	Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata,1998:18).

Analisis deskripsi dapat dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel. Adapun rumus deskriptif persentase adalah sebagai berikut :

$$P\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

% : Persentase yang diperoleh.

n : Jumlah skor yang diperoleh dari data.

N : jumlah skor ideal (Muhammad Ali, 1992 : 184)

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data sebagai berikut :

- a) Membuat tabel
- b) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan dengan ketentuan mengubah skor kualitatif menjadi kuantitatif dengan cara :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

Dimana : % = persentase jawaban yang diperoleh,

n = jumlah skor yang diperoleh dari data

N = jumlah skor yang ideal (Muhammad Ali, 1992:184).

- c) Menjumlahkan skor yang diperoleh dari tiap-tiap responden

Jawaban A skor nilainya 4

Jawaban B skor nilainya 3

Jawaban C skor nilainya 2

Jawaban D skor nilainya 1

- d) Memasukkan skor jawaban tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

- e) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori

Persentase tertinggi = $(4:4) \times 100\% = 100\%$

Persentase terendah = $(1:4) \times 100\% = 25\%$

Rentang = $100\% - 25\% = 75\%$

Panjang kelas interval = $75\% : 4 = 18,75\%$

Dengan panjang kelas 18,75% dan persentase terendah 25% dapat dibuat kriteria sebagai berikut :

81,26 – 100 = sangat Tepat

62,51 – 81,25 = Tepat

43,76 – 62,50 = cukup Tepat

25,00 – 43,75 = kurang Tepat

(Muhammad Ali, 1994: 184)

Tabel 3.5
Kategori Deskriptif Persentase

Persentase	Kategori
$81.25\% \leq 100.0\%$	Sangat Tepat
$62.50\% \leq 81.25\%$	Tepat
$43.75\% \leq 62.50\%$	Cukup Tepat
$25.00\% \leq 43.75\%$	Kurang Tepat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah dan Responden Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Dari monografi desa diperoleh data tentang letak Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Desa Bandingan
- 2) Sebelah Timur : Desa Sokanegara
- 3) Sebelah Selatan : Desa Bukateja
- 4) Sebelah Barat : Desa Cilapar

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga mempunyai luas wilayah sekitar 309.512 ha. Desa Lamuk mempunyai 10 RW dengan jumlah 20 RT dengan kepadatan penduduk 3.498 jiwa (Monografi Desa Lamuk Tahun 2008).

4.1.1.2 Kondisi Rumah Tangga Miskin

4.1.1.2.1 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Tingkat Pendidikan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Tingkat Pendidikan					Total
	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Perguruan tinggi	Lainnya..	
I	2	4	0	0	0	6
II	0	5	3	0	0	8
III	3	4	2	0	0	9
IV	3	7	0	0	0	10
V	3	2	4	1	0	10
VI	8	1	0	0	0	9
VII	2	7	1	0	0	10
VIII	4	3	2	0	0	9
IX	3	6	0	0	0	9
X	2	5	1	0	0	8
KK	30	44	13	1	0	88
Persentase (%)	34.09	50.00	14.77	1.14	0	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada keluarga miskin yang tamat SD sejumlah 30 orang atau (34,09%), jumlah keluarga miskin yang tamat SMP adalah 44 orang atau 50,00%, keluarga miskin yang lulus SMA sebanyak 13 orang (14,77%) dan yang perguruan tinggi hanya satu atau (1,14%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga miskin di Desa Lamuk telah tamat SMP yaitu sebanyak 50,00 %.

4.1.1.2.2 Jenis Lantai

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jenis lantai tempat tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jenis Lantai Tempat Tinggal Keluarga Miskin di Desa Lamuk Dirinci Berdasarkan Rukun Warga

RW	Jenis Lantai Tempat Tinggal				Total
	Tanah	Plester	Tegel	Keramik	
I	1	2	3	0	6
II	4	4	0	0	8
III	3	4	1	1	9
IV	3	6	1	0	10
V	2	8	0	0	10
VI	2	6	1	0	9
VII	4	1	5	0	10
VIII	1	4	3	1	9
IX	2	3	4	0	9
X	2	5	1	0	8
KK	24	43	19	2	88
Persentase (%)	27,27	48,86	21,59	2,27	100

Sumber: Data penelitian diolah (2008)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jenis lantai tempat tinggal keluarga miskin yang terbuat dari tanah sebanyak 24 orang (27,27 %), jenis lantai tempat tinggal terbuat dari plester sebanyak 43 orang (48,86 %), jenis lantai terbuat dari tegel sebanyak 19 Orang (21,59 %), dan jenis lantai yang terbuat dari keramik sebanyak 2 orang (2,27 %). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis lantai tempat tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk terbuat dari plester.

4.1.1.2.3 Jenis Dinding

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jenis dinding tempat tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jenis Dinding Tempat Tinggal Keluarga Miskin Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Jenis Dinding Tempat Tinggal				Total
	Bambu	Papan	Setengah Tembok	Tembok berplester	
I	1	0	0	5	6
II	2	4	2	0	8
III	6	1	0	2	9
IV	2	4	1	3	10
V	1	6	2	1	10
VI	5	2	1	1	9
VII	3	2	3	2	10
VIII	2	2	2	3	9
IX	2	2	0	5	9
X	2	4	2	2	8
KK	26	27	11	24	88
Persentase (%)	29,54	30,68	12,50	27,27	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dinding tempat tinggal keluarga miskin yang terbuat dari bambu tanpa plester sebanyak 26 orang (29,54 %), jenis dinding tempat tinggal yang terbuat dari papan sebanyak 27 orang (30,68 %), jenis dinding terbuat dari setengah tembok sebanyak 11 Orang (12,50 %), dan yang terbuat dari tembok berplester sebanyak 24 orang (27,27 %). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian dinding tempat tinggal keluarga miskin terbuat dari papan yaitu sebesar 30,68 %.

4.1.1.2.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Fasilitas Tempat Buang Air Besar keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.4
Fasilitas Tempat Buang Air Besar Keluarga Miskin Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Total
	Tidak mempunyai	milik umum	milik pribadi	lebih dari 1	
I	0	0	5	1	6
II	3	1	4	0	8
III	1	2	6	0	9
IV	2	1	7	0	10
V	2	0	8	0	10
VI	4	1	4	0	9
VII	1	4	5	0	10
VIII	2	1	6	0	9
IX	2	0	7	0	9
X	1	1	6	0	8
KK	18	11	58	1	88
Persentase (%)	20,45	12,50	65,91	1,14	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa keluarga miskin di Desa Lamuk yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sebanyak 18 orang (20,45%), sedangkan yang masih menggunakan sarana Baung air besar milik umum sebanyak 11 orang (12,50%), yang memiliki sarana buang air besar milik pribadi sebanyak 65,91 %. Dan yang mempunyai fasilitas buang air besar lebih dari satu sebanyak 1,14 %. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar telah memiliki fasilitas buang air besar milik pribadi yaitu sebanyak 65,91% . Namun di sisi lain masih banyaknya orang yang tidak mempunyai fasilitas yaitu sebanyak 20,45 % memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran keluarga miskin akan tingkat kesehatan masih rendah, karena masih terbiasanya mereka menggunakan fasilitas buang air besar milik umum.

4.1.1.2.5 Jenis Bahan Bakar

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Jenis Bahan Bakar yang digunakan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jenis Bahan Bakar Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Jenis Bahan Bakar				Total
	Kayu bakar	Minyak tanah	Gas	Gas dan minyak tanah	
I	3	3	0	0	6
II	6	0	0	2	8
III	6	0	2	1	9
IV	7	0	1	2	10
V	4	0	2	4	10
VI	9	0	0	0	9
VII	10	0	0	0	10
VIII	4	2	0	3	9
IX	5	0	0	4	9
X	8	0	0	0	8
KK	62	5	5	16	88
Persentase (%)	70,45	5,68	5,68	18,18	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Dari tabel 4.5 di atas menggambarkan bahwa kondisi jenis bahan bakar yang digunakan keluarga miskin adalah sebanyak 62 orang (70,45%) masih menggunakan kayu bakar, sedangkan sebanyak 5 orang (5,68%) menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sebanyak 5 orang (5,68%) menggunakan gas sebagai bahan bakar dan sisanya sebanyak 18,18 % menggunakan minyak tanah dan gas. Di Desa Lamuk pada bulan Juni telah ada konversi minyak tanah ke gas, dan semua keluarga mendapatkan jatah kompor dan gas dari pemerintah. Dalam penggunaan keseharian mereka masih tetap memilih kayu bakar sebagai bahan memasak.

4.1.1.2.6 Konsumsi Daging

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Daging yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.6
Konsumsi Daging Dalam Satu Minggu Bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Berdasarkan Rukun Warga

RW	Konsumsi Daging Dalam Satu Minggu				Total
	Tidak pernah atau satu kali	2 kali	3 kali	Lebih dari 3 kali	
I	6	0	0	0	6
II	6	2	0	0	8
III	9	0	0	0	9
IV	10	0	0	0	10
V	4	4	2	0	10
VI	7	2	0	0	9
VII	9	1	0	0	10
VIII	9	0	0	0	9
IX	9	0	0	0	9
X	8	0	0	0	8
KK	79	5	3	1	88
Persentase (%)	89,77	5,68	3,41	1,14	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa kebiasaan mengkonsumsi daging bagi keluarga miskin dalam satu minggu kategori tidak pernah atau satu kali dalam satu minggu adalah 79 orang (89,77%), mengkonsumsi daging dua kali dalam seminggu sebanyak 5 orang (5,67%), mengkonsumsi daging tiga kali dalam seminggu sebanyak 3 orang (3,41%) dan kebiasaan mengkonsumsi daging lebih dari tiga kali dalam seminggu sebanyak 1 orang (1,14%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin tidak pernah atau hanya satu kali mengkonsumsi daging dalam satu minggu, hal tersebut dikarenakan jumlah pendapatan keluarga miskin yang relatif rendah sehingga hanya mampu untuk membeli lauk apa kadarnya.

4.1.1.2.7 Konsumsi Ayam

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Ayam Dalam Satu Minggu yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.7
Konsumsi Ayam Dalam Satu Minggu Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Konsumsi Ayam Dalam Satu Minggu				Total
	Tidak pernah	1 kali	2 kali	Lebih dari 2 kali	
I	3	0	3	0	6
II	6	2	0	0	8
III	5	3	1	0	9
IV	6	2	1	1	10
V	3	4	1	2	10
VI	7	2	0	0	9
VII	8	2	0	0	10
VIII	7	2	0	0	9
IX	9	0	0	0	9
X	8	0	0	0	8
KK	64	15	6	3	88
Persentase (%)	72,72	17,05	6,82	3,01	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan keluarga miskin mengkonsumsi ayam dalam satu minggu ketegori tidak pernah sebanyak 64 orang atau sebesar 72,72 %. Sedangkan kategori satu kali mengkonsumsi ayam dalam satu minggu sebanyak 15 orang (17,05%), mengkonsumsi ayam sebanyak dua kali dalam satu minggu sebanyak 6 orang (6,82%) dan ketegori lebih dari 2 kali hanya sebanyak 3 orang atau sebesar 3,01. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa masih rendahnya tingkat konsumsi ayam pada keluarga miskin, bahkan untuk kategori tidak pernah mengkonsumsi ayam sangat besar yaitu sebesar 72,72 %, menggambarkan bahwa pola konsumsi keluarga miskin tidak mengedepankan konsumsi ayam, karena terbentur masalah keuangan.

4.1.1.2.8 Konsumsi Susu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Susu Dalam Satu Minggu yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.8
Konsumsi Susu Dalam Satu Minggu Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Konsumsi Susu Dalam Satu Minggu				Total
	Tidak pernah atau satu kali	2 kali	3 kali	Lebih dari 3 kali	
I	6	0	0	0	6
II	5	1	0	2	8
III	5	4	0	0	9
IV	6	1	1	2	10
V	2	2	1	5	10
VI	7	2	0	0	9
VII	10	0	0	0	10
VIII	9	0	0	0	9
IX	9	0	0	0	9
X	8	0	0	0	8
KK	70	9	3	6	88
Persentase (%)	79,55	10,23	3,40	6,82	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kondisi keluarga miskin dalam kaitannya dengan kebiasaan mengkonsumsi susu dalam satu minggu adalah sebagai berikut, untuk kategori tidak pernah atau satu kali mengkonsumsi susu dalam satu minggu sebanyak 70 orang (79,55%), mengkonsumsi sebanyak dua kali dalam seminggu adalah 9 orang (10,23%), tiga kali dalam satu minggu sebanyak 3 orang (3,40%), sedangkan yang terbiasa mengkonsumsi susu lebih dari tiga kali dalam satu minggu sebanyak 6 orang (6,82%). Penjabaran tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat konsumsi susu pada keluarga miskin tergolong masih sangat rendah, sebanyak 79,55% masuk kategori tidak pernah

atau satu kali dalam seminggu mengkonsumsi susu, kecenderungan mereka tidak mengkonsumsi susu karena harganya yang relatif mahal sehingga lebih suka menggantinya dengan minuman lain seperti teh atau kopi.

4.1.1.2.9 Frekuensi Pembelian Pakaian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan Frekuensi Pembelian Pakaian Dalam Satu Tahun keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.9
Frekuensi Pembelian Pakaian Dalam Satu Tahun Keluarga Miskin di Desa Lamuk Berdasarkan Rukun Warga

RW	Frekuensi Pembelian Pakaian Dalam Satu Tahun				Total
	1-2 kali	3-4 kali	5 kali	Lebih dari 5 kali	
I	4	2	0	0	6
II	8	0	0	0	8
III	9	0	0	0	9
IV	10	0	0	0	10
V	8	1	1	0	10
VI	9	0	0	0	9
VII	10	0	0	0	10
VIII	9	0	0	0	9
IX	9	0	0	0	9
X	8	0	0	0	8
KK	83	3	2	0	88
Persentase (%)	94,32%	3,41	2,27	0%	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa kebiasaan keluarga miskin dalam membeli pakaian dalam satu tahun sebanyak satu kali sebanyak 83 orang atau 94,32%, sedangkan yang membeli pakaian sebanyak tiga kali dalam setahun sebanyak 3 orang (3,41%), membeli pakaian lima kali dalam satu tahun sebanyak 2 orang (2,27%). Hal tersebut menggambarkan bahwa kebiasaan membeli pakaian bagi keluarga miskin yaitu mereka hanya membeli pakaian sebanyak satu kali dalam satu tahun yang mewakili (94,32%). Kebiasaan masyarakat desa terutama

keluarga miskin yaitu mereka membeli pakaian hanya pada saat menjelang hari raya.

4.1.1.2.10 Frekuensi Makan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Frekuensi Makan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.10
di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Makan Dalam Satu Hari				Total
	< 2 kali	2 kali	3 kali	Lebih dari 3 kali	
I	2	3	1	0	6
II	2	1	5	0	8
III	0	2	7	0	9
IV	0	4	6	0	10
V	1	2	6	1	10
VI	4	1	4	0	9
VII	2	4	4	0	10
VIII	0	2	7	0	9
IX	0	3	6	0	9
X	0	1	7	0	8
KK	11	28	48	1	88
Persentase (%)	12,50	31,82	54,54	1,34	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kebiasaan makan dalam satu hari dua kali sebanyak 11 orang (12,50%), makan dua sampai tiga kali dalam sehari sebanyak 28 orang (31,82%). Kebiasaan yang makan tiga kali sehari sebanyak 54,54 %, dan yang terbiasa makan lebih dari tiga kali dalam sehari hanya satu responden atau 1,34%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun mereka masuk dalam kategori keluarga miskin namun sebagian besar dari mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan sehari tiga kali yaitu sebesar 54,54%.

4.1.1.2.11 Akses Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Akses Kesehatan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.11
Akses Kesehatan Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Akses Kesehatan Keluarga Miskin di Desa Lamuk				Total
	Dibiarkan saja karena tidak mampu	Mantri	Puskesmas	Dokter spesialis	
I	0	4	2	0	6
II	2	2	4	0	8
III	2	2	5	0	9
IV	0	5	5	0	10
V	1	2	7	0	10
VI	5	1	3	0	9
VII	2	2	6	0	10
VIII	1	3	5	0	9
IX	1	2	6	0	9
X	2	2	4	0	8
KK	17	24	47	0	88
Persentase (%)	19,32	27,27	53,41	0	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin yang tidak mampu berobat pada waktu sakit sebanyak 19,32%, berobat ke Mantri sebanyak 27,27%, pergi ke Puskesmas sebanyak 53,41%, dan dokter spesialis 0,00%. Hal ini menunjukkan sebagian besar keluarga miskin menggunakan Puskesmas 53,41%. Dan ke dokter spesialis sebanyak 0%. Hal ini dikarenakan keluarga miskin dapat berobat gratis di puskesmas dengan menggunakan kartu berobat gratis sehingga sebagian besar keluarga miskin dapat memanfaatkannya ketika menderita sakit. Hal ini pengaruh dari rendahnya pendapatan keluarga miskin, sehingga tidak mempunyai biaya yang besar untuk berobat ke tempat lain selain berobat ke Puskesmas.

4.1.1.2.12 Jumlah Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Jumlah Penghasilan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.12
Jumlah Penghasilan Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Jumlah Penghasilan				Total
	Kurang Rp. 600.000	Rp. 600.000,- < sampai dengan ≤ Rp 800.000	Rp 800.000,- < sampai dengan ≤ Rp 1.000.000	Diatas Rp. 1.000.000	
I	6	0	0	0	6
II	5	1	2	0	8
III	8	1	0	0	9
IV	9	1	0	0	10
V	4	3	3	0	10
VI	7	2	0	0	9
VII	7	3	0	0	10
VIII	6	2	1	0	9
IX	6	3	0	0	9
X	6	2	0	0	8
KK	67	18	3	0	88
Persentase (%)	76,13	20,45	3,41	0	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan data Tabel 4.12, dapat diketahui jumlah pendapatan kepala keluarga miskin antara kurang dari 600 ribu sebanyak 67 orang (76,13 %), 600 ribu sampai dengan 800 ribu sebanyak 18 orang (20,45 %), 800 ribu samapai dengan 1 juta sebanyak 3 orang (3,41 %), lebih dari 1 juta sebanyak 0 (0 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan keluarga miskin kurang dari 600 ribu. Hal ini merupakan pengaruh dari sebagian besar pekerjaan sebagai petani serta ditambah dengan statusnya sebagai penggarap lahan pertanian orang lain, dengan pembagian keuntungan lebih besar pemilik lahan pertanian. Pendapatan petani juga tidak menentu tergantung dari hasil panen padi yang telah diperoleh, semakin besar hasil panen semakin besar pendapatan mereka dan

semakin kecil hasil panen semakin kecil pula pendapatan yang mereka terima. Pendapatan yang diterima sebagian besar warga miskin yang hanya kurang dari 600 ribu jelas sangat memberatkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga, ditambah dengan beban keluarga yang besar.

4.1.1.2.13 Jumlah Tabungan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jumlah tabungan yang dimiliki oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.13
Tabungan Keluarga Miskin di Desa Lamuk
Berdasarkan Rukun Warga

RW	Jumlah Tabungan				Total
	Tidak dapat disisikan	Kurang dari Rp 100.000,-	Rp 100.000,- ≤ sampai dengan < Rp 500.000,-	Diatas Rp 500.000,-	
I	3	3	0	0	6
II	5	1	2	0	8
III	6	3	0	0	9
IV	8	2	0	0	10
V	4	3	3	0	10
VI	8	1	0	0	9
VII	7	3	0	0	10
VIII	8	1	0	0	9
IX	9	0	0	0	9
X	7	1	0	0	8
KK	69	17	2	0	88
Persentase (%)	78,41	19,32	2,27	0	100

Sumber: Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan data Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang tidak mempunyai tabungan sebanyak 69 orang (78,41 %), kurang dari 100 ribu sebanyak 17 orang (19,32%), antara 100 ribu sampai dengan 500 ribu sebanyak 2 orang (2,27%), di atas 500 ribu sebanyak 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin tidak mempunyai tabungan. Hal ini merupakan

pengaruh dari rendahnya tingkat pendapatan mereka sehingga pendapatan yang didapat hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan belum mampu untuk ditabung, Padahal mempunyai tabungan sangat penting, apalagi jika terdapat kebutuhan keluarga yang tidak terduga.

4.1.2 Implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

4.1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan (Fisik)

4.1.2.1.1 Deskripsi Program

Pelaksanaan kegiatan fisik yang dilakukan di Desa Lamuk yaitu kegiatan pembangunan serta perbaikan saluran irigasi dan pembuatan sarana air bersih. Kegiatan irigasi yang dilakukan untuk memperbaiki saluran irigasi yang telah ada dan menambah saluran irigasi baru guna untuk menambah daya tampung air sehingga kebutuhan air para petani tercukupi, serta dapat menampung kelebihan air hujan agar tidak menggenangi sawah dan dapat tersalurkan ke hilir. Program air bersih yang dilakukan yaitu memperbaiki 10 titik sumur yang airnya kotor dengan tujuan untuk tersediannya air bersih diharapkan akan meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Miskin dan masyarakat pada umumnya. *(Tim Penulis Usulan Desa Lamuk 2008)*.

4.1.2.1.2 Dana Yang dikucurkan

Dana yang dialokasikan untuk program kegiatan lingkungan fisik di Desa Lamuk dengan rincian untuk kegiatan irigasi sebesar Rp 53.240.000, sedangkan untuk Kegiatan air bersih sebesar Rp 41.602.000. untuk program air bersih dana diimplementasikan secara merata ke seluruh 10 RW yang terdapat di Desa Lamuk.

4.1.2.1.3 Sasaran program yang telah tercapai

Pelaksanaan program irigasi di laksanakan di Dusun IV yaitu RW 07 dan RW 08 telah terlaksana, pelaksanaan program irigasi ini dilaksanakan atas usulan dari warga masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan merasa kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah.

Pelaksanaan program air bersih telah berjalan dengan memperbaiki sumur-sumur kumuh yang airnya kotor, dengan alokasi tempat setiap RW mendapatkan prioritas 1 titik sumur. Jadi jumlah keseluruhan ada 10 titik sumur yang diperbaiki.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut sesuai target program adalah 3 bulan, tapi realisasi dilapangan proyek irigasi dapat terselesaikan hanya dalam waktu 46 hari, hal itu sesuai dengna yang di sampaikan Bp. Sakri selaku ketua pelaksana Program

“.....kalau alokasi waktu dikerjakan selama target program adalah 3 bulan, tapi bias dilaksanakan talud irigasi selama 46 hari itu selesai, kalau air bersih dikerjakan setiap satu titik sumur dikerjakan satu tukang dengan tiga pekerja...”

Dengan relatif cepatnya pengerjaan program irigasi dan air bersih maka petani dan rumah tangga miskin merasa sangat terbantu. Petani merasa terbantu karena tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka, dan masyarakat juga sangat terbantu dengan tersedianya sarana air bersih di lingkungan mereka sehingga tidak lagi mengalami kesulitan air bersih.

4.1.2.2 **Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan**

Implementasi PNPM tahun 2008 di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di 13 desa di Kecamatan Kejobong. Implementasi PNPM tahun 2008 merupakan proyek dari pemerintah yang pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Kejobong, demikian juga untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. Pada tingkat kecamatan, pelaksanaan program dilakukan oleh PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) yang bertugas untuk memonitoring pelaksanaan PNPM di tingkat desa, sedangkan pada tingkat desa pelaksanaan program dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) beserta TPU (Tim Pengelola Usulan), serta KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) yang bertugas melaksanakan program simpan pinjam di tingkat RW. Kepengurusan TPK,UPK dan KSM bersifat sukarela, sehingga tidak ada paksaan untuk menjadi relawan dalam pelaksanaan program PNPM mandiri Perdesaan.

4.1.2.3 **Sasaran Program PNPM mandiri Perdesaan**

Sasaran utama implementasi program PNPM mandiri Perdesaan di Desa Lamuk adalah keluarga miskin yang tersebar di 10 RW dengan total keberadaan KSM sebanyak 15 KSM

4.1.2.4 **Tahapan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan**

1. Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri

Pelaksanaan program PNPM diDesa Lamuk Kecamatan Kejobong menitikberatkan pada kegiatan lingkungan, kegiatan kesehatan dan kegiatan Ekonomi (simpan pinjam). Dibawah ini merupakan jenis dan proporsi kegiatan :

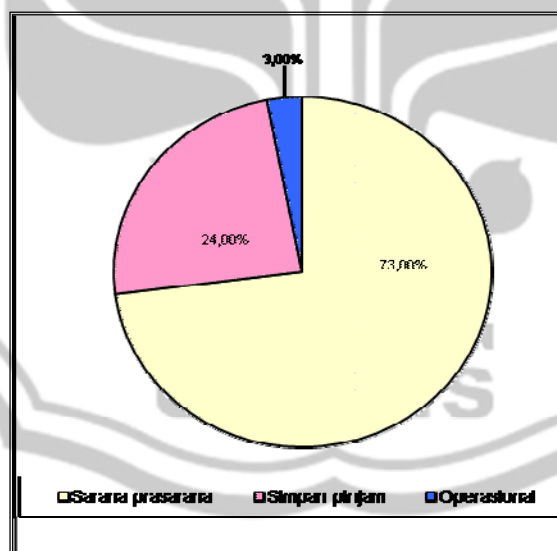
Tabel 4.13
Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Jenis Kegiatan	Proporsi
- Kegiatan Lingkungan dan kesehatan 1. Program Irigasi 2. Air bersih	73 %
-Kegiatan Ekonomi (Pinjaman Modal Bergulir)	24 %
-BOP (Dana Operasional TPK)	3 %

Sumber : Surat Penetapan Camat Kejobong

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran seperti berikut ini :

Gambar 4.1 Proporsi Dana PNPM Mandiri



Tabel 4.13 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi PNPM mandiri di Desa Lamuk dititikberatkan pada kegiatan lingkungan fisik dan kesehatan yaitu program pembangunan irigasi dan pembuatan air bersih yang

mencapai 73% dari seluruh anggaran dari kecamatan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 24 %. Hal ini dikarenakan, adanya kebutuhan air yang sangat mendesak dari para petani dan juga adanya kekurangan air bersih, sehingga Implementasi PNPM yang pertama kalinya dilaksanakan di Desa Lamuk menitikberatkan pada bidang fisik.

4.1.2.5 Jumlah Dana yang dialokasikan

Dana Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa lamuk merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD Kabupaten Purbalingga. Selain dana dari APBN dan APBD, juga terdapat dana swadaya masyarakat Desa lamuk. Untuk lebih jelas dalam proporsi jumlah dana yang dialokasikan dapat dilihat dalam Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14 Proporsi Jumlah Dana Program PNPM Mandiri

Jenis Kegiatan	Alokasi dana APBN	BOP UPK (2%)	BOP TPK (3%)	Swadaya Masyarakat	Total
1. Irigasi	53.240.000	1.120.800	1.681.300	5.647.500	56.042.100
2. Air bersih	41.602.500	875.800	1.313.800	0	43.792.100
3. Simpan Pinjam	31.500.000	663.200	994.800	0	33.158.000

(surat penetapan camat kejobong 2008)

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa total dana yang dialokasikan dari APBN dan APBD sebanyak Rp 127.344.700, sedangkan untuk dana swadaya sebesar Rp 5.647.500 sehingga total dana yang dialokasikan untuk implementasi PNPM mandiri desa Lamuk sebesar Rp. 132.992.200,

4.1.2.6 Tahapan Penyaluran Dana

Pencairan dana secara bertahap melalui 2 tahap baik program fisik baik irigasi maupun air bersih, berdasarkan RPD (rencana Penggunaan Dana) setelah selesai ada LPD (Laporan Penggunaan Dana). rincian pencairan dana yaitu jumlah alokasi dana ditambah 5 % dengan rincian 2% untuk UPK dan 3% untuk operasional. Atas dasar musdes di kecamatan sesuai dengan proposal yang diajukan, namun untuk mengurangi kecemburuan anatar desa maka diputuskan besarnya dana dalam satu kecamatan dibagi menjadi 13 dan besarnya hampir sama.

4.1.2.7 Realisasi Penyaluran Dana

Pada tahap realisasi ternyata mengalami ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan dana yang terealisasi dari kecamatan. Hal itu dapat terlihat pada table 4.15

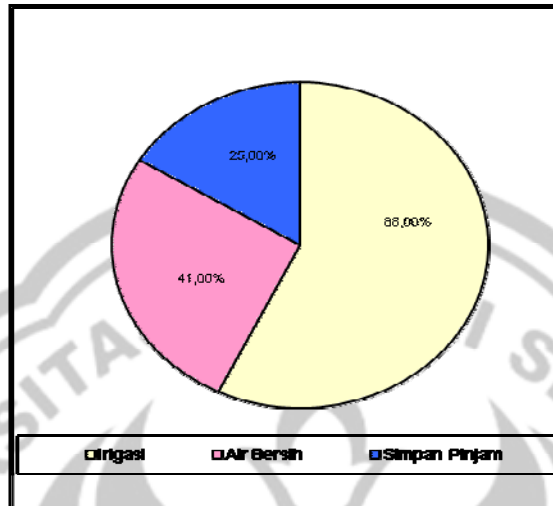
Tabel 4.15 Realisasi Dana PNPM Mandiri

Jenis kegiatan	Total Dana yang diajukan	Realisasi dana	Realisasi
1. Irigasi	60.000.000	53.240.000	88%
2. Air bersih	100.000.000	41.602.500	41%
3. Simpan Pinjam	127.000.000	31.500.000	25%

(surat penetapan camat kejobong 2008)

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran seperti berikut ini :

Gambar 4.2 Realisasi Dana PNPM Mandiri



Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi dana pada program fisik yang meliputi program irigasi mencapai hampir mencapai 88%, yaitu dari rencana kegiatan Rp.60.000.000 dalam pelaksanaannya terpenuhi sebanyak Rp.53.240.000, dengan adanya tambahan dana swadaya dari masyarakat sebanyak Rp. 5.647.500. Sedangkan untuk kegiatan air bersih, dari rencana semula mengajukan dana sebesar Rp. 100.000.000 ternyata dalam realisasi hanya disetujui sebesar Rp.41.602.500 atau terealisasi sebesar 41%. Untuk simpan pinjam kelompok perempuan dari yang semula diajukan sebesar Rp.127.000.000 untuk 15 kelompok dengan besaran tiap anggota mendapat Rp.8.500.000 dalam realisasinya hanya mendapatkan dana Rp.31.500.000 untuk 8 kelompok. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Gentur Selaku KPMD:

“..... kalau realisasi dulunya SPP saya ajukan satu kelompok Rp.8.500.000 pada awalnya kami mengajukan 15 kelompok tapi setelah di verifikasi hanya ada 8 kelompok yang diterima oleh tim verifikasi, itupun tidak sama jumlahnya ada yang sekelompok 5 orang, 8 orang, bahkan ada yang 12 orang...”

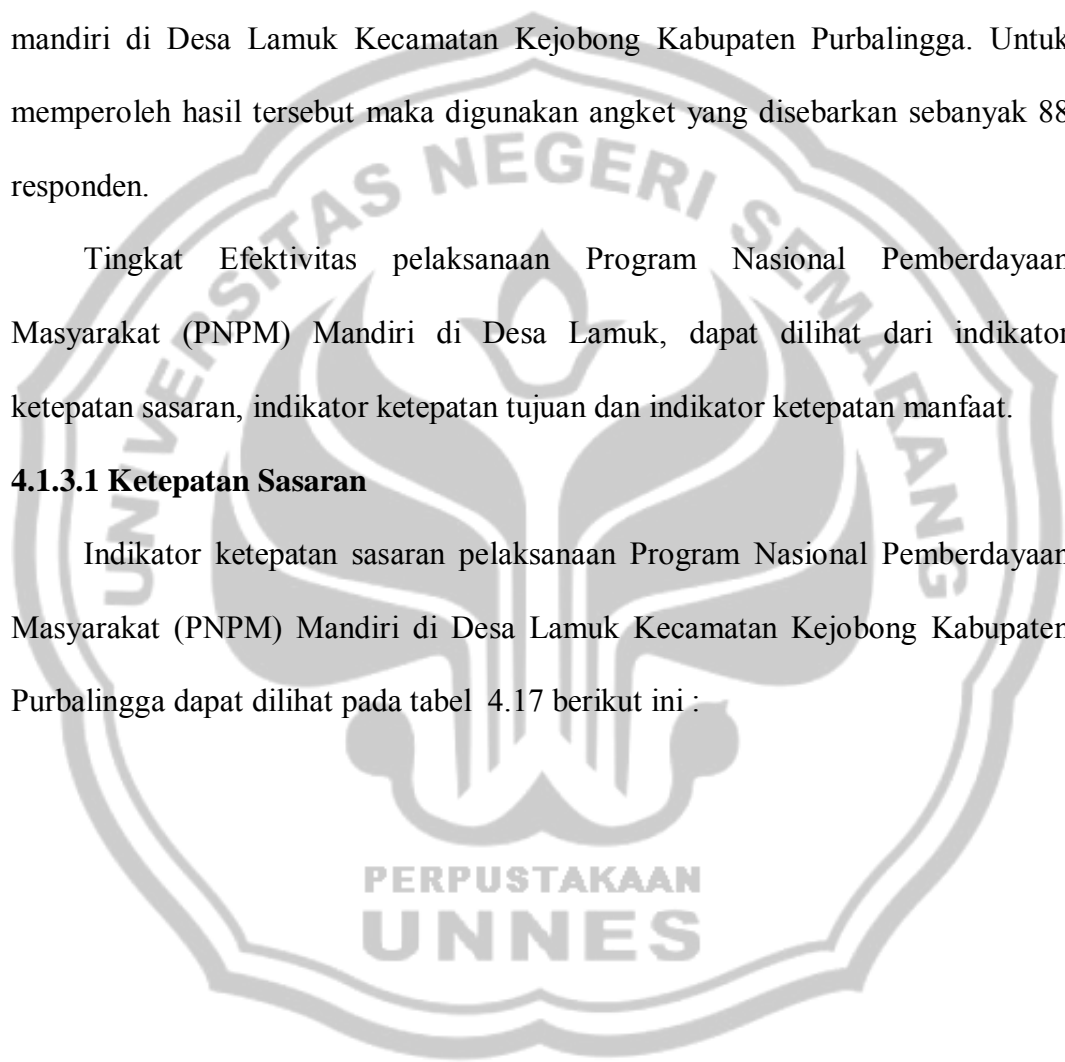
4.1.3 Hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Untuk memperoleh hasil tersebut maka digunakan angket yang disebarakan sebanyak 88 responden.

Tingkat Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk, dapat dilihat dari indikator ketepatan sasaran, indikator ketepatan tujuan dan indikator ketepatan manfaat.

4.1.3.1 Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :



Tabel 4.17
Ketepatan Sasaran Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk
yang dirinci per RW

N O	RW	Jumlah responden	Frekuensi				Persen (%)			
			ST	T	CT	TT	ST	T	CT	TT
1	I	6	1	5	0	0				
2	II	8	4	2	2	0				
3	III	9	3	6	0	0				
4	IV	10	2	6	2	0				
5	V	10	1	3	6	0				
6	VI	9	5	4	0	0				
7	VII	10	4	6	0	0				
8	VIII	9	1	8	0	0				
9	IX	9	2	7	0	0				
10	X	8	2	6	0	0				
Total		88			10	-				

Sumber : data kuesioner yang diolah

Keterangan :

ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden)

T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden)

CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden)

TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan sasaran program yang dilakukan terhadap 88 dipresentasikan adalah sebagai berikut :

Jumlah responden : 88

Jumlah soal : 13

Jumlah alternative jawaban : 4

Skor Tertinggi : $88 \times 13 \times 4 = 4576$

Skor terendah : $88 \times 13 \times 1 = 1144$

Rentang skor : $(4576 - 1144) : 4 = 858$

Nilai Riil : $(0 \times 1 \times 13) + (5 \times 2 \times 13) + (30 \times 3 \times 13) + (53 \times 4 \times 13)$

: $0 + 130 + 1170 + 2756 = 4056$

Dari tabel diatas di intervalkan untuk mengetahui pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di desa Lamuk berdasarkan inidikator ketepatan sasaran tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
Indikator Ketepatan Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk

No	Skor	Frekuensi
1	3718 – 4576	53
2	2860 – 3717	30
3	2002 – 2859	5
4	1144 – 2001	0
Jumlah		88

Sumber : data kuesioner yang diolah

Tabel 4.19
Gambaran Indikator Ketepatan Sasaran

Indikator	Skor Ideal	Skor Riil	%	Kategori
Ketepatan sasaran	4576	4056	88,63	Sangat Tepat

Sumber : data kuesioner yang diolah

Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 88,63 % setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria ketepatan sasaran termasuk dalam kategori **Sangat Tepat**.

4.1.3.2 Ketepatan Tujuan

Selain bertujuan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan, program PNPM juga bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan dan memberdayakan kondisi sosial dan ekonomi penduduk miskin khususnya di daerah perdesaan. Selain itu program PNPM juga diharapkan memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan ditingkat pemerintahan Kota/Kabupaten. Guna mendorong terjadinya proses perkembangan sosial ekonomi penduduk miskin ke arah yang lebih maju.

Tabel 4.20
Ketepatan Tujuan Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk
yang dirinci per RW

N O	RW	Jumlah responden	Frekuensi				Persen (%)		
			ST	T	CT	TT			
1	I	6	3	3	0	0			-
2	II	8	7	1	0	0			-
3	III	9	4	5	0	0			-
4	IV	10	9	1	0	0	90.00	10.00	-
5	V	10	6	4	0	0	60.00	40.00	-
6	VI	9	3	5	1	0	33.33	55.56	11.11
7	VII	10	5	5	0	0			-
8	VIII	9	8	1	0	0	88.89	11.11	-
9	IX	9	2	7	0	0			-
10	X	8	4	2	2	0			-
Total		88							

Sumber : data kuesioner yang diolah

Keterangan :

ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden)

T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden)

CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden)

TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan tujuan program yang dilakukan terhadap 88 dipresentasikan adalah sebagai berikut :

Jumlah responden : 88

Jumlah soal	: 11
Jumlah alternative jawaban	: 4
Skor Tertinggi	: $88 \times 11 \times 4 = 3872$
Skor terendah	: $88 \times 11 \times 1 = 968$
Rentang skor	: $(3872 - 968) : 4 = 726$
Nilai Riil	: $(0 \times 1 \times 11) + (3 \times 2 \times 11) + (30 \times 3 \times 11) + (55 \times 4 \times 11)$
	: $0 + 66 + 990 + 2420 = 3476$

Dari tabel diatas di intervalkan untuk mengetahui pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk berdasarkan inidikator ketepatan tujuan tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini :

Tabel 4.21
Indikator Ketepatan Tujuan pelaksanaanPNPM mandiri di Desa Lamuk

No	Skor	Frekuensi
1	3146 - 3872	55
2	2420 - 3145	30
3	1694 - 2419	3
4	968 - 1693	0
Jumlah		88

Sumber : data kuesioner yang diolah

Tabel 4.22
Gambaran Indikator Ketepatan Tujuan

Indikator	Skor Ideal	Skor Riil	%	Kategori
Ketepatan Tujuan	3476	3872	89,77	Sangat Tepat

Sumber : data kuesioner yang diolah

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 89,77 % setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria rata-rata ketepatan tujuan termasuk dalam kategori **Sangat Tepat**.

4.1.3.3 Ketepatan Manfaat

Indikator ketepatan manfaat pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk yang terdiri dari 7 butir pertanyaan yaitu nomor 27,28,29,30,31,32, dan 33 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.23
Ketepatan Manfaat Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk
yang dirinci per RW

NO	RW	Jumlah responden	Frekuensi				Persentase (%)			
			ST	T	CT	TT	ST	CT	T	TT
1	I	6	3	0	3	0	50.00	0	50.00	0
2	II	8	5	1	2	0				
3	III	9	3	2	4	0				
4	IV	10	3	2	4	1				
5	V	10	4	5	0	1				
6	VI	9	7	1	1	0				
7	VII	10	1	5	4	0	10.00	50.00	40.00	0
8	VIII	9	2	5	0	2				
9	IX	9	2	3	4	0				
10	X	8	5	3	0	0				
	Total	88								

Sumber : data kuesioner yang diolah

Keterangan :

ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden)

T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden)

CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden)

TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan tujuan program yang dilakukan terhadap 88 dipresentasikan adalah sebagai berikut :

Jumlah responden : 88

Jumlah soal : 7

Jumlah alternative jawaban : 4

Skor Tertinggi : $88 \times 7 \times 4 = 2464$

Skor terendah : $88 \times 7 \times 1 = 616$

Rentang skor : $(2464 - 616) : 4 = 462$

Nilai Riil : $(3 \times 1 \times 7) + (20 \times 2 \times 7) + (24 \times 3 \times 7) + (41 \times 4 \times 7)$

: $21 + 280 + 504 + 1148 = 1953$

Dari tabel diatas di intervalkan untuk mengetahui pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk berdasarkan indikator ketepatan manfaat tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.24 berikut ini :

Tabel 4.24
Indikator Ketepatan Manfaat Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk

No	Skor	Frekuensi
1	2002 - 2464	41
2	1540 - 2001	24
3	1078 - 1539	20
4	616 - 1077	3
Jumlah		88

Sumber : data kuesioner yang diolah

Tabel 4.25
Gambaran Indikator Ketepatan Manfaat

Indikator	Skor Ideal	Skor Riil	%	Kategori
Ketepatan Manfaat	2464	1953	79,26	Tepat

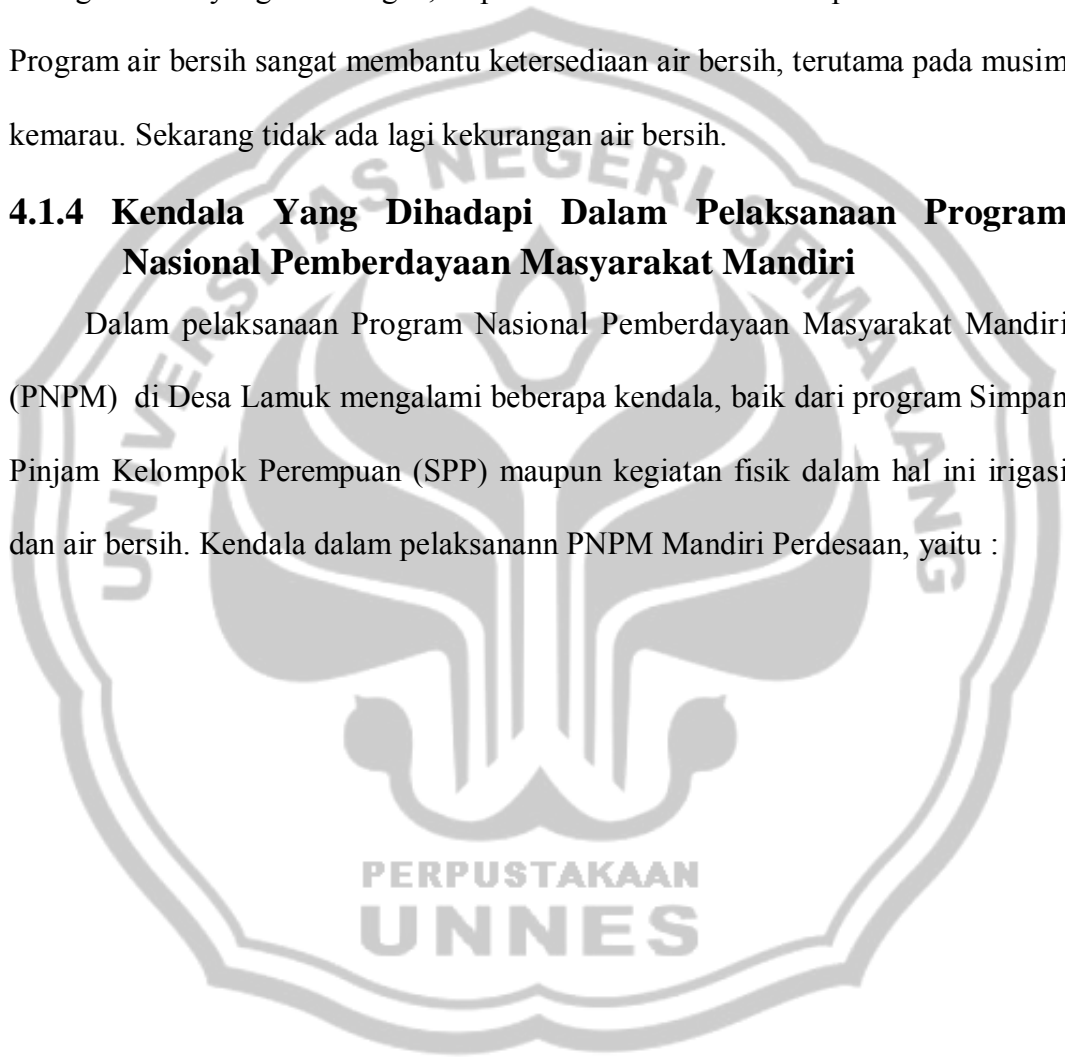
Sumber : data kuesioner yang diolah

Dari tabel 4.25 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan manfaat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 79,26 % setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria rata-rata ketepatan manfaat termasuk dalam kategori **Tepat**.

Dengan melihat hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sasaran sangat terbantu dengan adanya Program PNPM Mandiri perdesaan, pelaksanaan program irigasi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena sebagian besar adalah petani sehingga mereka langsung dapat menikmati manfaat dari program irigasi, tidak adalagi sawah yang kekeringan, dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka. Program air bersih sangat membantu ketersediaan air bersih, terutama pada musim kemarau. Sekarang tidak ada lagi kekurangan air bersih.

4.1.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Lamuk mengalami beberapa kendala, baik dari program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) maupun kegiatan fisik dalam hal ini irigasi dan air bersih. Kendala dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :



Tabel 4.26 Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

No	Kendala	Pengelola (TPK)	Objek program
1.	Waktu	Pelaksanaan program bertepatan dengan musim penghujan, hal tersebut menyulitkan pengelola dalam melakukan kegiatan.	1. Rendahnya keswadayaan masyarakat khususny dalam swadaya tenaga. 2. Keterbatasan mengakses informasi sehingga RTM kurang mengetahui serta peran mereka dalam pelaksanaan program
2.	Letak	Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia	
4.	Dana	<ul style="list-style-type: none"> - TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada - Tidak adanya dana pelestarian hasil kegiatan 	3. Adanya keterbatasan kelompok KSM yang menerima dana pinjam, karena pada saat verifikasi banyak anggota yang tidak hadir.
5.	Administrasi	Rumitnya sistem pelaporan ke UPK (Unit Pengelola Kecamatan)	
6.	Kepengurusan	Adanya keanggotaan TPK yang tidak aktif sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan	

Dari table 4.23 dapat dilihat bahwa pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk mengalami beberapa kendala, baik yang berasal dari pengelola program maupun dari rumah tangga sasaran

1. Pelaksanaan kegiatan fisik bertepatan dengan musim penghujan menyebabkan pengelola mengalami kesulitan karena beratnya medan kegiatan.
2. Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia. Pada kegiatan irigasi yang dilakukan di wilayah Dusun 04, tempat kegiatan jauh dari jalan besar sehingga menyulitkan pekerja proyek dalam melaksanakan kegiatan

khususnya yang berkaitan dengan pengangkutan material. Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia, menyebabkan waktu pelaksanaan sedikit mengalami kemunduran dan juga menyebabkan pembengkakan biaya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Bapak Sakri selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

“...Waktunya adalah musim penghujan sehingga untuk mengangkut dari pada material sampai ke proyeknya itu sangat susah, karena medannya luar biasa sulit, sehingga materialnya sampai beberapa puluh meter diangkut oleh tenaga orang...” (wawancara, 23 juni 2009)

3. Tidak adanya dana pelestarian hasil, yaitu tidak dimasukkannya biaya pemeliharaan hasil dari program tersebut, sedangkan TPK sebagai pengelola di tingkat desa diminta bertanggung jawab atas pemeliharaan hasil tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Prio Atmojo

“... kesulitan bagi saya menjadi kesulitan masalah pemeliharaan, memang dari sana dari UPK memang harus menjaga hasil PNPM tapi karena belum ada danya maka diambil alih oleh desa dan dipasrahkan ke lingkungan tersebut. Untuk irigasi dipasrahkan ke kepala dusun setempat...”(wawancara, 02 juli 2009)

Senada dengan hal tersebut, Bapak Sakri juga menjelaskan

“...kendala lain yang di hadapi dalam program fisik yaitu tidak adanya dana untuk pelestarian hasil, dala rencana anggaran pelaksana program tidak termasuk dana pelestarian...”(wawancara, 23 juni 2009)

4. Dalam hal administrasi, TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sakri, bahwa besarnya dana operasional yang besarnya 3% dari jumlah dana program, sekitar Rp. 3.989.900 masih terlalu

kecil, karena untuk biaya sekali musdes mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.600.000. Selain kecilnya dana BOP TPK, rumitnya administrasi juga dirasa sebagai kendala bagi pengelola program, seperti diungkapkan oleh Bapak Sakri

“... dalam pelaporan harus dibuat sedetail mungkin, sebagai contoh pada saat membeli pasir, itu harus dicantumkan jenis kendaraan, ukuran lebar tinggi panjang bak kendaraan, bahkan sampai plat nomor kendaraan pengangkut harus dicantumkan, dan juga pembuatan laporan baik berupa RPD (Rencana Penggunaan Dana), LPD (Laporan Penggunaan Dana)”
(wawancara, 23 juni 2009)

5. Swadaya dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tenaga relative rendah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prio atmojo selaku bendahara Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

“...Dalam pelaksanaan karena masyarakat telah di rong-rong oleh bantuan-bantuan pemerintah, jadi yang seharusnya saya membutuhkan swadaya dalam bentuk kerja bakti rendah, tapi ya masih ada yang mau...”(wawancara, 02 juli 2009)

Selanjutnya beliau menambahkan

“...swadaya yang rendah membutuhkan swadaya sangat sedikit yaitu dengan menghubungi lingkungan sekitar seperti irigasi ya minta tenaga dari kadus 4, untuk air bersih ada swadaya, cuman istilahnya untuk membawa material, contoh dibawah gunung masyarakat sekitar dimintai tenaga untuk membawa material...”(wawancara, 02 juli 2009)

6. Kendala dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yaitu bahwa adanya keterbatasan jumlah (Kelompok Simpan Pinjam) KSM yang mendapatkan pinjaman, hal ini dikarenakan waktu ada verifikasi bertepatan dengan masa panen sehingga banyak anggota yang tidak hadir pada saat verifikasi, dari pihak verifikasi menyatakan bahwa anggota KSM yang tidak hadir maka dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan pinjaman.

4.1.4 Solusi dalam menghadapi kendala yang ada

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pengelola program mempunyai alternative solusi untuk menghadapi kendala yang ada, untuk mensiasati kesulitan lokasi maka pengelola kegiatan mengambil jalan yaitu dengan memanfaatkan tenaga manusia untuk mengangkut material-material yang dibutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sakri

“...Kalau kendala musim hujan ini tidak bisa ditanggulangi, yang penting kita melaksanakan program ini dengan tekun, dilaksanakan tetapi memakan biaya yang lebih banyak, karena menggunakan tenaga orang maka ada pembengkakan biaya...”(wawancara, 23 juni 2009)

Solusi dalam menghadapi rendahnya swadaya yang ada, pengelola melakukan pendekatan kepada warga sekitar proyek, dengan melibatkan mereka dalam proyek tersebut untuk membantu mengangkut material-material, walaupun mereka ada yang dihitung sebagai pekerja dan mendapatkan upah. Diungkapkan oleh Bapak Prio atmojo

“..Swadaya yang rendah, untuk saluran air bersih dibutuhkan tenaga untuk ngarug tanah saya mengambil sedikit tenaga swadaya dari kadus 04. Untuk air bersih ya sebatas membawa material ke lokasi...”

Solusi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelestarian hasil progam yang ada yaitu dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekitar untuk menjaga pemeliharaan.

“...Dalam hal pelestarian hasil kedepan fasilitator dari kecamatan mengharapkan ada dana pelestarian, untuk sementara ini ya dikembalikan kepada lingkungan sekitar...”

Untuk irigasi, pihak pengelola menetapkan iuran untuk pemeliharaan yang ditujukan untuk para RTM penerima progam. Untuk air bersih nantinya

diterapkan iuran bagi warga pengguna sarana tersebut, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan warga. Bapak Sakri mengungkapkan

“...Penggunaan menggunakan dana lain-lain yang diambil dari iuran potongan (dua panen sekali) yang dipungut kepada para petani. Pelestarian air bersih diserahkan pada lingkungan sekitar...”

4.2 Pembahasan

1. Kondisi Keluarga Miskin di Desa Lamuk

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kondisi keluarga miskin di Desa Lamuk bahwa sebagian besar keluarga miskin masih jauh tingkat kesejahteraannya, kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan papan masih rendah.

Walaupun rata-rata telah mampu makan sehari tiga kali namun kemampuan dalam mengkonsumsi daging, susu, atau ayam rata-rata hanya satu kali dalam seminggu serta hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun. Hal itu tentunya kurang dapat memenuhi kebutuhan akan gizi. Dalam hal papan, terlihat dari dinding tempat tinggal sebagian besar terbuat dari bambu. Tentu saja kurang bisa dianggap layak untuk sebuah kesejahteraan. Kondisi demikian diperparah dengan rendahnya pendapatan keluarga miskin dengan rata-rata berpendapatan kurang dari Rp. 600.000 dalam sebulan. Jumlah yang rendah jika dibandingkan dengan tingginya harga-harga kebutuhan pada masa sekarang ini dan banyaknya tanggungan keluarga yang mereka tanggung, kecilnya pendapatan menyebabkan keluarga miskin akan selalu miskin. Menurut Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (1997 : 107) penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan “Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya”.

Pola kemiskinan di Desa Lamuk adalah *seasonal poverty*, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat miskin bekerja sebagai petani sehingga kondisi keluarga bergantung pada hasil pertanian, sedangkan jenis kemiskinan di Desa Lamuk adalah kemiskinan alamiah, hal ini disebabkan karena rendahnya sumber daya yang ada.

2. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk yang telah dilaksanakan yaitu pembuatan saluran irigasi dan pembuatan sarana air bersih telah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan kegiatan selesai lebih awal yaitu dari rencana awal 3 bulan dalam kenyataan dilapangan dapat diselesaikan hanya 45 hari. Hasil kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan warga. Sarana irigasi dan air bersih memang sangat dibutuhkan warga Desa Lamuk, setelah melewati proses perencanaan kegiatan yaitu Musyawarah antar Dusun (MUSDUS), kemudian dibawa ke tingkat desa yaitu Musyawarah Desa (MUSDES) akhirnya disepakati bahwa kegiatan yang dipilih yaitu pembuatan saluran irigasi dan air bersih. Alokasi dana kegiatan fisik mencapai 73% dari seluruh anggaran dari kecamatan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 24 %, hal itu menjadi kebijakan Tim Pengelola Program (TPK) setiap desa dengan

menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang di usulkan dan dibutuhkan oleh warganya Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat sebagai penerima program.

3. Hasil dari Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

Dari hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk berdasarkan kriteria ketepatan sasaran, ketepatan tujuan dan ketepatan manfaat dapat dilihat dalam tabel 4.27 dibawah ini :

Tabel 4.27 Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk

Indikator	Skor Ideal	Skor Riil	%	Kategori
Ketepatan sasaran	4576	4056	88,63	Sangat Tepat
Ketepatan Tujuan	3476	3872	89,77	Sangat Tepat
Ketepatan Manfaat	2464	1953	79,26	Tepat

Dari tabel 4.27 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk adalah **sangat tepat sasaran, sangat tepat tujuan dan tepat manfaat**. Rumah tangga miskin sebagai sasaran telah dapat menikmati hasil dari program tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam program PNPM mandiri sangat besar, dari mulai penetapan rencana kegiatan melalui MUSDUS (Musyawarah Dusun), MUSDES (Musyawarah Desa) sampai usaha pelaksanaan kegiatan dan juga pelestarian hasil. Manfaat yang dapat diambil dari program tersebut telah mampu dirasakan oleh rumah tangga sasaran yaitu sawah para petani tidak lagi mengalami kekeringan pada musim kemarau sekalipun, sehingga dampaknya dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka. Program air bersih

sangat membantu ketersediaan air bersih, terutama pada musim kemarau. Sekarang tidak ada lagi kekurangan air bersih. Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri telah tercapai hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter Drucker dalam Handoko (1997:7) “Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar”. Berdasarkan temuan diatas bahwa pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan cita-cita awal yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan, pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lebih memberdayakan masyarakat, sesuai dengan yang dikemukakan Kartasmita (1995:18) bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Lamuk mengalami beberapa kendala, baik dari program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) maupun kegiatan fisik dalam hal ini irigasi dan air bersih.

Kendala dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :

No	Kendala	Pengelola (TPK)	Objek program
1.	Waktu	Pelaksanaan program bertepatan dengan musim penghujan, hal tersebut menyulitkan pengelola dalam melakukan kegiatan.	1. Rendahnya keswadayaan masyarakat khususnya dalam swadaya tenaga.
2.	Letak	Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia	2. Keterbatasan mengakses informasi sehingga RTM kurang mengetahui serta peran mereka dalam pelaksanaan program
4.	Dana	<ul style="list-style-type: none"> - TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada - Tidak adanya dana pelestarian hasil kegiatan 	3. Adanya keterbatasan kelompok KSM yang menerima dana pinjam, karena pada saat verifikasi banyak anggota yang tidak hadir
5.	Administrasi	Rumitnya sistem pelaporan ke UPK (Unit Pengelola Kecamatan)	
6.	Kepengurusan	Adanya keanggotaan TPK yang tidak aktif sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan	

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pengelola program mempunyai alternatif solusi untuk menghadapi kendala yang ada, khususnya tentang tidak adanya dana pelestarian hasil. Dalam hal ini TPK selaku penanggungjawab kegiatan bekerjasama dengan aparat setempat yaitu para Kepala Dusun (Kadus), Ketua Rukun Warga (RW) Ketua Rukun Tangga (RT) untuk bisa mengelola hasil PNPM yang berupa sarana irigasi dan air bersih.

Pelaksanaan kegiatan sejenis kedepan diharapkan adanya dana pelestarian hasil, sehingga hasil-hasil kegiatan yang ada dapat terus dimanfaatkan keberadaannya oleh para penerima sasaran sehingga manfaat dari program tersebut dapat terus dinikmati.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Kondisi keluarga miskin di Desa Lamuk bahwa sebagian besar keluarga miskin masih jauh tingkat kesejahteraannya, jenis lantai dan dinding tempat tinggal sebagian besar terbuat dari bambu dengan lantai berplester, telah memiliki sarana buang air besar, jenis bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar, kebiasaan mengkonsumsi daging/susu/ ayam dalam seminggu dengan jumlah tidak pernah atau satu kali dalam satu minggu, kebiasaan membeli pakaian hanya sebanyak sekali dalam kurun waktu satu tahun, memanfaatkan puskesmas sebagai akses kesehatan, berpendapatan kurang dari Rp. 600.000 dalam sebulan, pendidikan SMP, tidak mempunyai tabungan.
- 2) Implementasi PNPM tahun 2008 di di Desa Lamuk berjalan dengan lancar, pelaksanaan implementasi PNPM di Desa Lamuk dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik yang berupa pembuatan saluran irigasi dan pembuatan sarana air bersih, non fisik berupa simpan pinjam. Aloksi dana kegiatan lingkungan fisik dengan rincian untuk kegiatan irigasi Rp. 53.240.000, air bersih Rp. 41.602.000. Irigasi di laksanakan di Dusun IV yaitu RW 07 dan RW 08 telah terlaksana. Pelaksanaan program air bersih

telah berjalan dengan memperbaiki sumur-sumur kumuh, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan diselesaikan selama 46 hari yaitu lebih cepat dari rencana awal yang mencapai 3 bulan. Dana PNPM merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD. Rincian pencairan dana yaitu jumlah alokasi dana ditambah 5% dengan rincian 2% untuk UPK dan 3% untuk operasional.

- 3) Tingkat keefektifitasan PNPM mandiri di Desa Lamuk, dapat dilihat dari indikator ketepatan sasaran, indikator ketepatan tujuan dan indikator ketepatan manfaat. Berdasarkan kriteria ketepatan sasaran dengan persentase **88,63 %** termasuk dalam kategori **sangat tepat**, berdasarkan kriteria ketepatan dengan persentase **89,72%** dalam ketegori **sangat tepat**. menurut kriteria ketepatan manfaat dengan persentase **79,26%** termasuk dalam ketegori **tepat**.
- 4) Pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut yaitu dari TPK yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan musim penghujan maka menyulitkan pengelola dalam melakukan kegiatan, tempat kegiatan jauh dari jalan besar sehingga menyulitkan pengelola proyek dalam melaksanakan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengadaan material. Kendala lain dalam dalam PNPM ini yaitu tidak adanya dana pelestarian hasil. Dalam hal administrasi, TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada. Upaya untuk mengatasi kendala yang ada antara lain :

- a) Memanfaatkan tenaga manusia untuk mengangkut material-material yang dibutuhkan.
- b) Dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekitar untuk menjaga pemeliharaan. Untuk irigasi, pihak pengelola menetapkan iuran untuk pemeliharaan yang ditujukan untuk para RTM penerima program dengan sistem iuran setelah panen. Untuk air bersih nantinya akan diterapkan iuran bagi warga pengguna sarana tersebut, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan warga



5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan PNPM hendaknya lebih ditingkatkan terutama masalah alokasi dana. Pemda Kabupaten Purbalingga seharusnya dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan proporsi dana PNPM sehingga implementasi PNPM dapat berjalan lebih optimal.
- (2) Bagi pemerintah selaku perencana program hendaknya menyertakan dana pelestarian, sehingga hasil program yang telah dilaksanakan dapat terus dijaga keberadaannya serta dapat terus diambil kemanfaatannya bagi rumah tangga sasaran.
- (3) Bagi TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan PNPM, TPK harus lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM, pemilihan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi struktur di TPK sehingga dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan kedudukannya dan supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang mengakibatkan adanya penumpukan tugas sehingga kinerja kurang optimal.
- (4) Bagi keluarga miskin, dengan adanya manfaat langsung (*Direct benefit*) dan manfaat tidak langsung (*Indirect benefits*) dari PNPM, Keluarga miskin untuk dapat mempergunakan sebaik-baiknya fasilitas irigasi dan air bersih untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan hasil pertanian, air bersih dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menanggulangi kekurangan kebutuhan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Arisudi, A dan Andarwati. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa melalui Operasi Pasar Khusus Beras (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk*. Universitas ekonomi Universitas Brawijaya : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences).
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Ali, Muhammad. 1992. *Statistika Penelitian*. Yogyakarta : BPEF
- Bayo Ala, Andre. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta:Liberty
- Handoko, Hani, 1997. *Manajemen*. Yogyakarta : BPEF
- HS. Dillon dan Hermanto. 1993. *Kemiskinan dinegara Berkembang, Masalah Konseptual dan Globalisasi*. Prisma No. 3 hal 11-2. Jakarta : LP3ES.
- Kantor Kecamatan Kejobong. *Data Rumah Tangga Miskin Tahun 2008*. Kejobong
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Studi Pembangunan*. ITB Bandung
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- N.R. Kurniawati. 2002. *Hubungan Penerimaan Upah dengan Kesejahteraan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
- Moeljarto. 1993. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moelong, Lexi J .2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Resived Ed)* .Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : ADITYA MEDIA.
- Mubyarto. 1997. *Teori Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : BPEF

- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Prayitno, Hadi. 1985. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta : LIBERTY.
- Sahdan, Gregorius, 2005, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. [http:// www.jurnalekonomirakyat.com](http://www.jurnalekonomirakyat.com)
- Salim, Emil. 1982. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Umar, Husein. 1998. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Koordinasi PNPM-PPK. 2007. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
-
- _____ 2006. LKPG Jateng, 2006. www.databps.com (10 februari 2009)
-
- _____ 2007. Copyright 2004 KBI.gemari.or.id.(10 februari 2009)

Filename: 6058
Directory: D:\AJIEK Digilib
Template: C:\Users\Pak
DEDE\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: imam
Keywords:
Comments:
Creation Date: 20/03/2011 20:58:00
Change Number: 3
Last Saved On: 20/03/2011 21:00:00
Last Saved By: pakdede
Total Editing Time: 12 Minutes
Last Printed On: 21/03/2011 7:32:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 120
Number of Words: 21.543 (approx.)
Number of Characters: 122.800 (approx.)